SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAH



2026
INDONESIA EMAS

MENUJU INDONESIA MAJU & BERDAULAT

Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D. | Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP.

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari kegelisahan yang jujur: mengapa bangsa yang besar, kaya sumber daya, dan panjang sejarah perjuangannya, justru seperti berjalan di tempat. Bahkan, sering mundur dalam urusan kedaulatan rakyat?

Selama puluhan tahun, Indonesia telah berkali-kali mengganti rezim, pemimpin, dan sistem pemilihan. Namun satu pertanyaan mendasar jarang disentuh secara serius: **apakah struktur negara kita masih menempatkan rakyat sebagai pemilik dan penguasa kedaulatan, ataukah rakyat hanya menjadi legitimasi simbolik bagi kekuasaan?**

Ungkapan Cak Nun tentang bangsa yang terus *kecelik* (tertipu berulang kali) bukan sekadar kritik moral. Ia adalah peringatan struktural. Bangsa tidak mungkin terus tertipu jika sistemnya sehat. Jika penipuan terjadi berulang, maka yang bermasalah bukan hanya orang-orangnya, tetapi **arsitektur negaranya**.

Buku *Indonesia Emas 2026* tidak ditulis untuk menyalahkan tokoh, rezim, atau generasi tertentu. Buku ini ditulis untuk mengajak pembaca **melihat ulang fondasi bernegara**, terutama setelah rangkaian amandemen UUD 1945 yang, meskipun membawa beberapa kemajuan, juga meninggalkan persoalan mendasar: hilangnya mekanisme nyata bagi rakyat untuk menguasai kedaulatannya sendiri.

Gagasan dalam buku ini berangkat dari satu prinsip sederhana namun radikal:

negara adalah milik rakyat, pemerintah hanyalah pelayan.

Jika prinsip ini benar-benar dipegang, maka seluruh struktur ketatanegaraan harus disesuaikan dengannya. Buku ini mencoba menawarkan kerangka berpikir, kritik konstitusional, sekaligus peta jalan menuju **Indonesia Emas 2026** agar tidak hanya sebagai slogan pembangunan, melainkan sebagai **momentum pemulihan kedaulatan rakyat secara sah dan bermartabat**.

Buku ini tidak menuntut persetujuan. Ia hanya mengajak pembaca untuk berpikir lebih jernih, lebih berani, dan lebih jujur pada konstitusi dan sejarah bangsa.

Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar panjang bangsa Indonesia untuk berhenti *kecelik* dan mulai benar-benar berdaulat.

Jakarta, Januari 2026

Tim Penulis

PROLOG
Bangsa yang Terus Kecelik

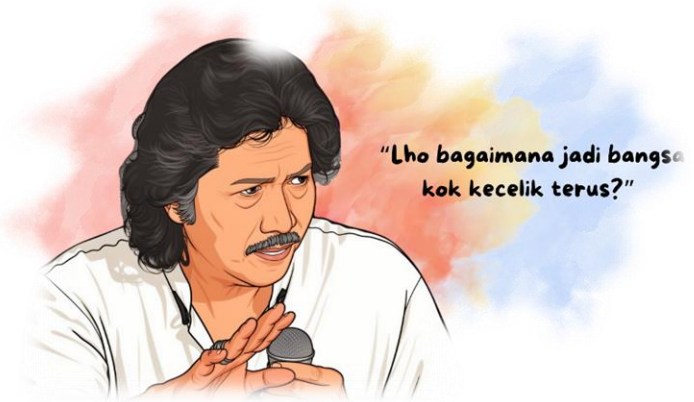

"Lho bagaimana jadi bangsa kok kecelik terus?"

Pertanyaan Cak Nun itu sederhana, nyaris seperti celetukan. Namun justru di situlah kekuatannya. Kalimat itu menelanjangi perjalanan panjang bangsa Indonesia dengan cara yang tidak bisa dibantah. Kita pernah tertipu dalam satu fase sejarah, lalu tertipu lagi di fase berikutnya, dan terus mengulangnya. Seolah-olah penipuan adalah takdir yang harus diterima.

Dua puluh lima tahun kecelik.

Tiga puluh dua tahun kecelik.

Masuk era reformasi yang diharapkan menjadi titik balik, namun justru melahirkan **kecelik versi baru**,

dengan bahasa, wajah, dan kemasan yang berbeda. Bahkan hari ini, kita seperti sedang sibuk **merancang kecelik yang akan datang**, sambil menyebutnya sebagai kemajuan.

Masalahnya bukan karena bangsa ini bodoh. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan akademisi, tidak kekurangan aktivis, dan tidak kekurangan pemimpin. Masalahnya adalah **bangsa ini hidup dalam struktur yang memungkinkan rakyat terus tertipu tanpa sadar sedang ditipu**.

Demokrasi berjalan, pemilu digelar rutin, kekuasaan berganti, tetapi posisi rakyat nyaris tidak berubah. Rakyat hadir sebagai angka, suara, dan legitimasi, tetapi absen sebagai penguasa nyata atas arah negara. Inilah paradoks terbesar demokrasi Indonesia hari ini.

Buku ini tidak hendak menawarkan jawaban instan. Ia juga tidak bermaksud memprovokasi emosi. Yang ingin dilakukan buku ini jauh lebih mendasar: **mengajak pembaca menelusuri akar struktural mengapa bangsa ini terus kecelik**, dan mengapa Indonesia Emas hanya mungkin terwujud jika struktur ketatanegaraan dibenahi.

Indonesia Emas 2026 dalam buku ini tidak dipahami sebagai target statistik, melainkan sebagai **titik balik kesadaran nasional**. Titik di mana bangsa ini berani berkata: cukup sudah. Cukup tertipu. Cukup berpura-pura berdaulat.

Indonesia Emas adalah Indonesia yang rakyatnya kembali menjadi pemilik negara.

Indonesia yang membedakan dengan tegas antara negara dan pemerintah.

Indonesia yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah, bukan milik.

Jika bangsa ini berani memulai perjalanan itu, maka Indonesia Emas bukan utopia. Ia adalah jalan pulang, dari bangsa yang terus kecelik, menuju bangsa yang berdaulat atas dirinya sendiri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
PROLOG ..... **III**
BANGSA YANG TERUS KECELIK ..... **III**
DAFTAR ISI ..... **VI**
DAFTAR GAMBAR ..... **XIV**

BAGIAN I. KESADARAN: BANGSA YANG TERUS KECELIK **1**
BAB I. BANGSA YANG TERUS KECELIK **2**
Kecelik Bukan Kebetulan 2
Demokrasi yang Ramai, Kedaulatan yang Kosong 3
Negara yang Disamakan dengan Pemerintah 5
Kedaulatan yang Dipreteli Secara Halus 6
Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Takut pada Rakyat 8
Mengapa Kecelik Terus Diulang 8
Indonesia Emas: Pertanyaan, Bukan Jawaban Instan 9

BAB 2. DEMOKRASI YANG RAMAI, RAKYAT YANG SEPI **11**
Keramaian yang Menipu 11
Rakyat sebagai Pemilih, Bukan Pemilik 12

Ketika Partai Menggantikan Rakyat 13
Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif 14
Kedaulatan yang Berubah Menjadi Simbol 15
Kritik yang Dicurigai, Kepatuhan yang Dihargai 15
Rakyat yang Sepi di Tengah Keramaian 16
Mengapa Demokrasi Tidak Melindungi Rakyat 17
Menuju Demokrasi yang Berdaulat 17

BAB 3. INDONESIA EMAS: MIMPI ATAU TIPU DAYA BARU? 18
Emas sebagai Slogan 18
Kemajuan Tanpa Kedaulatan 19
Ilusi Partisipasi 19
Negara yang Berlari Lebih Cepat dari Rakyat 20
Mengulang Pola Lama dengan Nama Baru 21
Emas sebagai Ujian Moral dan Konstitusional 21
Pertanyaan yang Tidak Bisa Dihindari 22
Menyiapkan Jalan yang Berbeda 22

BAGIAN II. DIAGNOSIS: SALAH STRUKTUR, BUKAN SALAH ORANG 23
BAB 4. NEGARA, PEMERINTAH, DAN KEKACAUAN KONSEP 24

Negara ≠ Pemerintah 24
Lembaga Negara ≠ Lembaga Pemerintah 25
Analogi Rumah Tangga: Kekeliruan Peran..... 26
Akibat Ketika Semua Disatukan..... 27
Akar Masalah Indonesia Hari Ini 29
Menuju Indonesia Emas: Memulihkan Batas yang Hilang 30

BAB 5. NEGARA SEBAGAI RUMAH, RAKYAT SEBAGAI PEMILIK, PEMERINTAH SEBAGAI PENGHUNI 31
Negara sebagai Rumah 32
Rakyat sebagai Pemilik Rumah 32
Pemerintah sebagai Penghuni Rumah (Asisten Rumah Tangga) 33
Penghuni Lain dalam Rumah Negara 34
TNI–Polri sebagai Penjaga Rumah 34
Ketika Rumah Negara Salah Kelola 35
Menuju Indonesia Emas: Menertibkan Rumah Negara 35

BAB 6. PERCERAIAN KONSTITUSIONAL RAKYAT DAN MPR 36
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen 37
Hilangnya Mandataris Rakyat 37

Rakyat Memiliki Kedaulatan, tetapi Tidak Menguasainya 38
Dampak Sistemik Perceraian Konstitusional..... 39
Perceraian yang Tidak Pernah Dikonsultasikan 40
Menuju Rekonsiliasi Konstitusional 40

BAGIAN III. KRITIK KONSTITUSIONAL: AMANDEMEN YANG MENYIMPANG 42
BAB 7. AMANDEMEN UUD 1945: DARI KOREKSI KE DISTORSI..... 43
Niat Awal Reformasi Konstitusi 44
Pergeseran Kekuasaan ke Presiden..... 45
MPR Kehilangan Fungsi Kepala Negara..... 46
Distorsi yang Dianggap Normal..... 46
Dari Koreksi ke Masalah Baru 47
Pelajaran untuk Indonesia Emas 47

BAB 8. PRESIDEN SEBAGAI ASISTEN RUMAH TANGGA..... 49
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Negara..... 50
Kritik Cak Nun: “Presiden Itu Outsourcing” . 51
Bahaya Presiden Tanpa Pengawas Struktural 52
Personalisasi Kekuasaan..... 53
Pelajaran Menuju Indonesia Emas 54

BAB 9. APARAT BINGUNG: MENJAGA RAKYAT ATAU KEKUASAAN 55
TNI–Polri dalam Struktur yang Kabur 56
Ketika Satpam Salah Mengenali Majikan 56
Dampak terhadap Keadilan 57
Dampak terhadap Kebebasan Sipil 58
Aparat sebagai Korban Sistem 59
Pelajaran Menuju Indonesia Emas 59

BAGIAN IV. SOLUSI PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT 60
BAB 10. MENIKAHKAN KEMBALI RAKYAT DAN MPR 61
MPR sebagai Kepala Negara 62
Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan 62
Negara sebagai Organisasi Milik Rakyat 63
Mengakhiri Kekacauan Konsep 64
Dari Simbol ke Substansi 64

BAB 11. NEGARA SEBAGAI ORGANISASI MODERN 65
UUD sebagai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 66
Rakyat sebagai Pemegang Saham 67
MPR sebagai RUPS 68
Presiden sebagai CEO 69

Akuntabilitas sebagai Jantung Organisasi Negara 69
Menuju Negara yang Profesional dan Berdaulat 70

BAB 12. MPR TANPA PARTAI POLITIK 71
Mengapa Partai Tidak Layak Menguasai MPR 71
Kedaulatan Tidak Bisa Dikelola dengan Logika Pemilu 72
Peran Cendekiawan, Rohaniawan, dan Budayawan 73
TNI–Polri sebagai Penjaga Negara, Bukan Pemerintah 74
MPR sebagai Forum Kebijaksanaan, Bukan Arena Kekuasaan 75
Menuju Negara yang Tertib dan Bermartabat 76

BAGIAN V. JALAN PERUBAHAN: DARI GAGASAN KE TRANSISI 77
BAB 13. ENAM OPSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT 78
1. Dekrit Presiden 79
2. Konvensi Nasional 80
3. Referendum Rakyat 81
4. Perubahan Melalui Parlemen 82

5. People Power 83
6. Kudeta Militer (Analisis Risiko & Sejarah) . 84
Menyatukan Tujuan, Bukan Menyamaratakan Jalan..... 85

BAB 14. TAHAPAN TRANSISI MENUJU INDONESIA EMAS 86
1. Pembubaran DPR, MPR, dan Partai Politik 86
2. Musyawarah Kenegaraan Nasional 87
3. Pembentukan Dewan Negara Transisi 88
4. Konsultasi Publik dan Semi-Referendum ... 89
Transisi sebagai Jalan Tengah Beradab..... 90

BAB 15. MPR SEMENTARA, TAP MPR, DAN PEMILU BARU 92
MPRS Sementara: Menjaga Arah Negara di Masa Transisi..... 93
TAP MPR sebagai Dasar Hukum Transisi 93
Komisi Pemilu & Referendum Nasional 94
Pemilu Pasca-Pemulihan Kedaulatan 95
Dari Transisi ke Normalisasi Demokrasi 96

BAB 16. INDONESIA EMAS YANG SESUNGGUHNYA 97
Ciri Negara Berdaulat 97
Rakyat sebagai Pusat Keputusan..... 98
Pemerintah sebagai Pelayan 99

Kemajuan yang Bermartabat.....100

BAB 17. NEGARA YANG TIDAK LAGI MENIPU RAKYAT.....101
Akhir Siklus Kecelik.....101
Negara Jujur pada Rakyat.....102
Demokrasi yang Bermakna.....103
Dari Janji ke Sistem.....103
Keberanian untuk Dewasa.....104

BAB 18. JALAN PULANG BANGSA.....105
Indonesia sebagai Republik Sejati.....105
Pesan Moral dan Konstitusional.....106
Seruan Kesadaran Nasional.....107
Pulang Tanpa Menghapus Jejak.....107
Republik yang Dimiliki Rakyat.....108

EPILOG. INDONESIA EMAS 2026: PILIHAN, BUKAN TAKDIR.....109
DAFTAR PUSTAKA.....111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Rakyat Indonesia yang Jatuh Ke Lubang Sama Berulang Kali 3
Gambar 2. Ilustrasi Demokrasi Indonesia 4
Gambar 3. Ilustrasi Negara Tidak Sama Dengan Pemerintah 5
Gambar 4. Ilustrasi Kedaulatan Rakyat yang Dipindahkan 7
Gambar 5. Logo Indonesia Emas 2026 9
Gambar 6. Ilustrasi Seremoni Kekuasaan 12
Gambar 7. Partai Politik Sebagai Filter Kekuasaan 13
Gambar 8. Infografis Demokrasi Prosedural VS Demokrasi Substantif 14
Gambar 9. Ilustrasi Kritik yang Dicurigai, Kepatuhan yang Dihargai 16
Gambar 10. Ilustrasi Indonesia Emas Hanyalah Slogan 18
Gambar 11. Ilustrasi Ilusi Partisipasi 20
Gambar 12. Ilustrasi Negara Tidak Sama Dengan Pemerintah 24
Gambar 13. Analogi Rumah Tangga Indonesia Saat Ini 26
Gambar 14. Ilustrasi Kekeliruan Peran Pemerintah 27
Gambar 15. Akar Masalah Indonesia Hari Ini 29

Gambar 16. Ilustrasi Rakyat yang Sukarela Memberikan Kunci Rumah Ke Pemerintah 31
Gambar 17. Ilustrasi Perceraian Konstitusional Rakyat Dan MPR 36
Gambar 18. Ilustrasi Rakyat Indonesia Kehilangan Kedaulatan 38
Gambar 19. Ilustrasi MPR RI yang Kehilangan Peran Sebagai Kepala Negara 43
Gambar 20. Ilustrasi Pergeseran Kekuasaan Ke Presiden 45
Gambar 21. Ilustrasi Presiden Sebagai Asisten Rumah Tangga 49
Gambar 22. Ilustrasi Personalisasi Kekuasaan 53
Gambar 23. Ilustrasi Presiden Tunduk Ke Rakyat 54
Gambar 24. Ilustrasi Aparat Bingung: Menjaga Rakyat Atau Kekuasaan 55
Gambar 25. Ilustrasi TNI-Polri Sebagai Penjaga Rumah 57
Gambar 26. Ilustrasi MPR Dan Rakyat Menikah Kembali 61
Gambar 27. Struktur Negara Ideal Sesuai Draft Amandemen Kelima 65
Gambar 28. Infografis Organ PT, Yayasan, Koperasi/Perkumpulan, dan Negara 67
Gambar 29. MPR Tanpa Partai Politik 71

Gambar 30. MPR Terdiri Dari Cendekiawan, Rohaniawan, Dan Budayawan 73
Gambar 31. Mpr Sebagai Forum Kebijaksanaan 75
Gambar 32. Enam Opsi Menuju Rakyat Kembali Berdaulat 78
Gambar 33. Ilustrasi Dekrit Presiden 79
Gambar 34. Ilustrasi Konvensi Nasional 80
Gambar 35. Ilustrasi Referendum Rakyat 81
Gambar 36. Ilustrasi Perubahan Melalui Parlemen 82
Gambar 37. Ilustrasi People Power 83
Gambar 38. Ilustrasi Kudeta Militer 84
Gambar 39. Ilustrasi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat 92
Gambar 40. Ilustrasi Pemilu Pasca-Pemulihan Kedaulatan 95
Gambar 41. Ilustrasi Indonesia Emas 97
Gambar 42. Ilustrasi Siklus Kecelik 101
Gambar 43. Ilustrasi Amandemen Kelima UUD NRI 1945 105

BAGIAN I
KESADARAN: BANGSA YANG TERUS KECELIK

BAB I
Bangsa yang Terus Kecelik

Bangsa yang besar seharusnya belajar dari sejarahnya. Namun Indonesia justru seperti bangsa yang berulang kali jatuh ke lubang yang sama, dengan ekspresi kaget yang selalu baru. Kita terkejut setiap kali tertipu, marah sesaat, lalu melangkah kembali di jalur yang sama, seolah tidak pernah benar-benar memahami apa yang salah.

Inilah yang oleh Cak Nun disebut sebagai *kecelik* bukan sekadar tertipu, tetapi **terjebak dalam sistem yang membuat penipuan tampak normal, bahkan sah**.

Indonesia telah melalui berbagai fase kekuasaan: Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era demokrasi elektoral hari ini. Setiap fase datang dengan janji perubahan. Setiap fase mengklaim sebagai koreksi atas masa lalu. Namun satu benang merahnya jelas: **rakyat selalu menjadi pihak yang paling berharap, tetapi paling sering dikecewakan**.

Mengapa ini bisa terjadi?

Kecelik Bukan Kebetulan

Penipuan yang terjadi sekali bisa disebut kesalahan. Penipuan yang terjadi dua kali bisa disebut kelengahan. Tetapi penipuan yang terjadi berulang-ulang, lintas rezim dan lintas generasi, **bukan lagi soal individu**, melainkan soal **struktur**.

Bangsa tidak mungkin terus kecelik jika sistemnya sehat. Sistem yang sehat akan menghentikan kebohongan sebelum menjadi kekuasaan. Sistem yang

sehat akan mengoreksi kesalahan sebelum membesar. Sistem yang sehat akan melindungi rakyat, bahkan dari pemimpinnya sendiri.

Jika Indonesia terus tertipu, maka pertanyaan yang jujur bukanlah *siapa yang menipu*, melainkan *mengapa sistem membiarkan penipuan itu terjadi*.



Gambar 1. Ilustrasi Rakyat Indonesia yang Jatuh Ke Lubang Sama Berulang Kali

Demokrasi yang Ramai, Kedaulatan yang Kosong

Hari ini Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Pemilu diselenggarakan secara rutin. Partai politik tumbuh subur. Media ramai. Media sosial penuh perdebatan. Namun di balik keramaian itu, ada kekosongan yang jarang disadari: **kedaulatan rakyat tidak benar-benar bekerja**.

Rakyat hadir sebagai pemilih, bukan sebagai pemilik negara.

Rakyat dipanggil lima tahun sekali, lalu dilupakan.

Rakyat dianggap berdaulat, tetapi tidak pernah memegang kendali.

Inilah paradoks demokrasi Indonesia: **prosedurnya hidup, substansinya mati**.



Gambar 2. Ilustrasi Demokrasi Indonesia

Kedaulatan berubah menjadi slogan. Ia diucapkan dalam pidato, ditulis dalam konstitusi, tetapi tidak diwujudkan dalam struktur kekuasaan sehari-hari. Rakyat memiliki hak memilih, tetapi tidak memiliki hak menentukan arah negara secara strategis.

Akibatnya, demokrasi tidak menjadi alat pembebasan, melainkan **mesin legitimasi**.

Negara yang Disamakan dengan Pemerintah

Salah satu akar kecelik paling berbahaya adalah **penyamaan negara dengan pemerintah**. Dalam kesadaran publik, negara seolah-olah identik dengan presiden dan kabinetnya. Kritik terhadap pemerintah dianggap kritik terhadap negara. Penolakan terhadap kebijakan dianggap tidak nasionalis.

Padahal secara prinsip, **negara jauh lebih besar daripada pemerintah**.

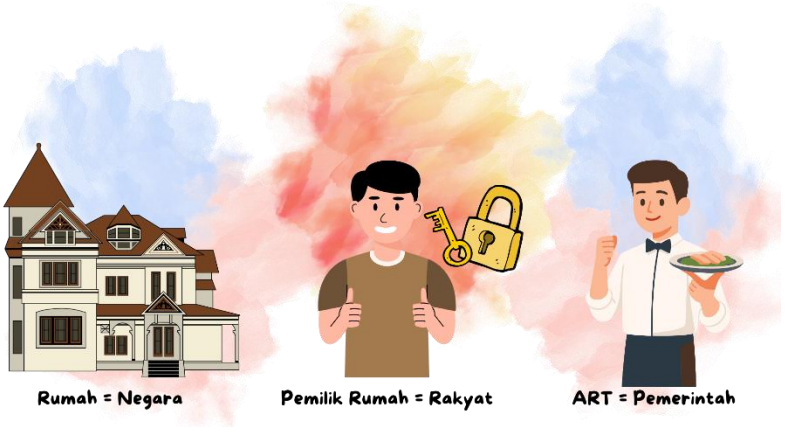

Gambar 3. Ilustrasi Negara Tidak Sama Dengan Pemerintah

Negara adalah rumah bersama. Pemerintah hanyalah pengelola sementara. Negara adalah entitas

jangka panjang; pemerintah hanya mandat lima tahunan. Ketika perbedaan ini kabur, maka kekuasaan mudah mengeras, dan rakyat kehilangan jarak aman untuk mengkritik.

Dalam kondisi seperti ini, kecelik menjadi sistemik. Rakyat tidak sadar bahwa yang mereka hadapi bukan negara, melainkan **pemerintah yang sedang melampaui batas mandatnya**.

Kedaulatan yang Dipreteli Secara Halus

Akar konstitusional dari kecelik ini dapat ditelusuri pada perubahan mendasar dalam UUD 1945 pasca-reformasi. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dijalankan secara konkret melalui mandatarisnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rakyat tidak hanya memiliki kedaulatan, tetapi **menguasainya**.

Namun setelah amandemen, kedaulatan rakyat tetap diakui, tetapi
cara menjalankannya menjadi kabur. Kedaulatan dilaksanakan "menurut Undang-Undang Dasar", bukan lagi oleh lembaga yang secara eksplisit bertindak sebagai pelaksana mandat rakyat.

Perubahan ini tampak teknis, tetapi dampaknya struktural. Rakyat menjadi pemilik kedaulatan tanpa alat kendali. Seperti pemilik rumah yang sah secara hukum, tetapi tidak memegang kunci rumahnya sendiri.

Di sinilah kecelik menjadi konstitusional. Bukan karena rakyat dibohongi, tetapi karena **kedaulatan**

mereka dipindahkan secara sah ke ruang yang tidak bisa mereka jangkau.



Gambar 4. Ilustrasi Kedaulatan Rakyat yang Dipindahkan

Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Takut pada Rakyat

Dalam sistem yang sehat, kekuasaan selalu takut pada rakyat. Bukan takut dalam arti paranoia, melainkan **takut melanggar mandat**. Ketika rasa takut itu hilang, kekuasaan berubah menjadi kebiasaan, lalu menjadi hak, dan akhirnya menjadi milik.

Indonesia hari ini berada di fase berbahaya: **kekuasaan terlalu nyaman**. Kritik dianggap gangguan. Perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai ancaman. Aparat sering kali lebih cepat melindungi kekuasaan daripada melindungi rakyat.

Ini bukan semata kesalahan individu aparat. Ini adalah akibat dari **struktur yang salah mengenalkan siapa majikan sesungguhnya**. Ketika negara dan pemerintah disatukan, aparat akan cenderung berpihak pada yang terlihat berkuasa, bukan pada yang seharusnya berdaulat.

Dalam kondisi seperti ini, rakyat bukan hanya kecelik. Mereka **dibiarkan tidak tahu harus berlindung ke mana**.

Mengapa Kecelik Terus Diulang

Bangsa yang terus kecelik biasanya memiliki satu ciri utama: **tidak pernah menyentuh akar masalah**. Kita sibuk mengganti aktor, tetapi enggan mengganti panggung. Kita menghukum individu, tetapi membiarkan sistem tetap utuh.

Setiap kali kekecewaan datang, kita berharap pada figur baru. Kita percaya pada jargon baru. Kita terpukau oleh kemasan baru. Namun struktur yang melahirkan kecelik tetap sama.

Maka wajar jika kecelik terus berulang karena yang berubah hanya wajah, bukan fondasi.

Indonesia Emas: Pertanyaan, Bukan Jawaban Instan



Gambar 5. Logo Indonesia Emas 2026

Di titik inilah gagasan **Indonesia Emas 2026** harus dipahami secara jernih. Indonesia Emas bukan hadiah waktu. Ia bukan otomatis datang karena bonus demografi atau pertumbuhan ekonomi. Indonesia Emas adalah **keputusan sadar untuk berhenti hidup dalam kebohongan struktural**.

Indonesia Emas menuntut keberanian untuk bertanya:

- Apakah rakyat benar-benar berdaulat?
- Apakah negara melindungi rakyat, atau kekuasaan?

- Apakah demokrasi kita membebaskan, atau hanya menghibur?

Selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, Indonesia Emas hanya akan menjadi **kecelik yang dikemas lebih rapi**.

BAB 2
Demokrasi yang Ramai, Rakyat yang Sepi

Demokrasi Indonesia hari ini tampak hidup. Pemilu digelar rutin, partai politik berlomba, baliho memenuhi jalan, debat yang membanjiri layar, dan media sosial riuh oleh opini. Dari luar, semua terlihat berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik keramaian itu, ada kenyataan yang sunyi: **rakyat tidak benar-benar hadir sebagai penguasa negara**.

Inilah paradoks terbesar demokrasi Indonesia. **Ritualnya ramai, substansinya sepi.**

Keramaian yang Menipu

Setiap lima tahun, rakyat dipanggil ke bilik suara. Mereka memilih wakil rakyat, memilih presiden, dan diyakinkan bahwa suara mereka menentukan arah bangsa. Namun setelah bilik suara ditinggalkan, **peran rakyat ikut ditinggalkan**.

Kebijakan strategis ditentukan di ruang-ruang yang jauh dari jangkauan publik. Keputusan besar tentang ekonomi, sumber daya alam, utang negara, hingga arah pembangunan nasional sering kali tidak melibatkan rakyat secara bermakna. Rakyat hadir sebagai angka statistik, bukan sebagai pemilik kehendak segelintir orang.

Inilah demokrasi yang **sibuk di permukaan, tetapi kosong di pusatnya**.

Rakyat sebagai Pemilih, Bukan Pemilik



Gambar 6. Ilustrasi Seremoni Kekuasaan

Dalam demokrasi yang sehat, rakyat bukan hanya pemilih, tetapi **pemilik negara**. Hak memilih hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Namun dalam praktik Indonesia, hak memilih diperlakukan seolah-olah sudah cukup untuk mewakili seluruh makna kedaulatan.

Rakyat diminta percaya bahwa setelah memilih, kekuasaan sepenuhnya berpindah tangan. Kritik dianggap gangguan. Protes dicurigai. Ketidakpuasan dilabeli tidak dewasa berdemokrasi.

Padahal, demokrasi tanpa mekanisme kendali rakyat hanyalah **seremonial kekuasaan**.

Ketika Partai Menggantikan Rakyat



Gambar 7. Partai Politik sebagai Filter Kekuasaan

Partai politik seharusnya menjadi alat rakyat. Namun dalam kenyataannya, partai sering berubah menjadi **filter kekuasaan** yang justru menjauhkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan.

Kaderisasi tertutup, pendanaan mahal, dan loyalitas internal membuat partai lebih sibuk menjaga kepentingannya sendiri daripada menjalankan mandat rakyat. Rakyat akhirnya hanya berinteraksi dengan partai saat kampanye, bukan saat kebijakan ditetapkan. Ketika partai mengambil alih peran rakyat, demokrasi kehilangan ruhnya. Yang tersisa hanyalah **kompetisi antar segelintir orang**, sementara rakyat menjadi penonton.

Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif



Gambar 8. Infografis Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substantif

Indonesia hari ini unggul dalam demokrasi prosedural. Semua tahapan formal dijalankan: pemilu, pelantikan, sidang, rapat, dan regulasi. Namun demokrasi substantive yang menempatkan rakyat sebagai pengendali arah negara justru tertinggal.

Demokrasi substantif menuntut:

- partisipasi bermakna,
- keterbukaan keputusan strategis,
- mekanisme koreksi oleh rakyat,
- dan perlindungan nyata terhadap kepentingan publik.

Tanpa itu, demokrasi berubah menjadi **mesin legitimasi**, bukan alat pembebasan.

Kedaulatan yang Berubah Menjadi Simbol

Kata "kedaulatan rakyat" masih sering diucapkan. Ia tertulis dalam konstitusi, diulang dalam pidato, dan dijadikan jargon semata. Namun dalam praktik, kedaulatan itu **tidak memiliki saluran operasional**.

Rakyat tahu mereka berdaulat, tetapi tidak tahu bagaimana menjalankannya. Ketika kebijakan merugikan publik, tidak ada mekanisme langsung bagi rakyat untuk menghentikannya. Ketika wakil rakyat menyimpang, koreksi baru mungkin dilakukan lima tahun kemudian. Itu pun melalui proses yang sama-sama dikendalikan partai.

Kedaulatan akhirnya menjadi **kata indah tanpa kuasa**.

Kritik yang Dicurigai, Kepatuhan yang Dihargai

Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah tanda kehidupan. Namun dalam demokrasi yang kehilangan pusat kedaulatan rakyat, kritik sering dianggap ancaman. Perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai masukan perbaikan.

Rakyat didorong untuk patuh, bukan untuk berdaulat. Kepatuhan dianggap kedewasaan. Ketundukan dipersepsikan sebagai nasionalisme. Di sinilah demokrasi mulai kehilangan daya koreksinya.

Ketika kritik dicurigai dan kepatuhan dihargai, **kecelik menjadi budaya**.



Gambar 9. Ilustrasi Kritik yang Dicurigai, Kepatuhan yang Dihargai

Rakyat yang Sepi di Tengah Keramaian

Rakyat hari ini dikelilingi oleh simbol demokrasi, tetapi kesepian secara politik. Mereka menyaksikan perdebatan pejabat yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari. Mereka mendengar janji-janji yang berulang tanpa perubahan struktural.

Kesepian ini bukan karena rakyat apatis, tetapi karena **ruang kedaulatan mereka dipersempit**. Demokrasi tidak menyediakan tempat bagi rakyat untuk benar-benar hadir sebagai subjek.

Mengapa Demokrasi Tidak Melindungi Rakyat

Demokrasi seharusnya melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun ketika struktur negara lebih berpihak pada kekuasaan daripada kedaulatan, demokrasi justru bisa menjadi alat legitimasi ketidakadilan.

Inilah sebabnya rakyat sering merasa tidak dilindungi oleh negara, meski hidup dalam sistem demokrasi. Perlindungan hukum ada di atas kertas, tetapi sulit diakses. Keadilan tersedia, tetapi mahal. Partisipasi dijanjikan, tetapi dibatasi.

Menuju Demokrasi yang Berdaulat

Jika Indonesia ingin keluar dari siklus kecelik, demokrasi harus dikembalikan ke makna dasarnya: **alat rakyat untuk mengendalikan negara**. Bukan sekadar metode memilih penguasa, tetapi mekanisme memastikan kekuasaan tidak melenceng dari mandat.

Bab-bab berikutnya akan membedah lebih jauh akar struktural dari demokrasi yang kehilangan substansi ini terutama bagaimana negara disamakan dengan pemerintah, dan bagaimana konstitusi mengalami pergeseran makna.

Keramaian demokrasi tidak cukup. Indonesia membutuhkan **kedaulatan yang hidup**.

Dan di sanalah perjalanan menuju Indonesia Emas harus dimulai.

BAB 3
Indonesia Emas: Mimpi atau Tipu Daya Baru?

Setiap zaman memiliki kata kunci harapan. Di masa lalu, kita menyebutnya *pembangunan*. Lalu *reformasi*. Hari ini, kata itu bernama **Indonesia Emas**. Ia terdengar menjanjikan, optimistis, dan futuristik. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama: **apakah ini benar-benar jalan keluar, atau sekadar kemasan baru dari kecelik lama?**

Bangsa yang pernah tertipu berkali-kali seharusnya belajar untuk berhenti mudah terpesona. Harapan tanpa koreksi struktur hanya akan melahirkan kekecewaan yang sama, dengan wajah yang lebih modern.

Emas sebagai Slogan



Gambar 10. Ilustrasi Indonesia Emas Hanyalah Slogan

Indonesia Emas sering dibicarakan dalam bahasa angka: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, bonus demografi, dan daya saing global. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. **Bangsa tidak hidup dari statistik semata**. Bangsa hidup dari rasa keadilan, rasa memiliki, dan keyakinan bahwa negara berdiri untuk melindungi rakyatnya.

Ketika Indonesia Emas direduksi menjadi target teknokratik, ia berisiko menjadi **slogan pembangunan**, bukan visi kebangsaan. Emas yang dimaksud hanya berkilau di laporan, tetapi tidak terasa di kehidupan sehari-hari rakyat.

Kemajuan Tanpa Kedaulatan

Sejarah dunia menunjukkan satu pelajaran penting: **kemajuan tanpa kedaulatan rakyat selalu rapuh**. Negara bisa tumbuh cepat, tetapi mudah runtuh ketika legitimasi sosialnya hilang. Pembangunan yang tidak disertai kedaulatan akan melahirkan ketimpangan, kecemasan, dan ketidakpercayaan.

Indonesia berisiko mengulangi pola ini. Kita membicarakan masa depan, tetapi tidak menyentuh akar masalah hari ini: **rakyat tidak berada di pusat pengambilan keputusan strategis**. Tanpa pemulihan posisi rakyat, Indonesia Emas hanya akan dinikmati oleh segelintir orang.

Ilusi Partisipasi

Salah satu tanda kuat dari tipu daya modern adalah **ilusi partisipasi**. Rakyat diajak bicara, diminta

masukan, dan dilibatkan secara simbolik. Namun keputusan inti tetap berada di ruang tertutup. Partisipasi menjadi formalitas, bukan kekuasaan.

Ilusi ini berbahaya karena membuat rakyat merasa sudah dilibatkan, padahal **kendali sejati tidak pernah berpindah**. Demokrasi tampil ramah, tetapi tidak berdaya. Inilah bentuk kecelik yang paling halus.



Gambar 11. Ilustrasi Ilusi Partisipasi

Negara yang Berlari Lebih Cepat dari Rakyat

Indonesia Emas sering dibingkai sebagai perlombaan global. Negara harus cepat, efisien, dan kompetitif. Namun pertanyaannya: **cepat menuju ke mana, dan meninggalkan siapa?**

Ketika negara berlari terlalu cepat tanpa memastikan rakyat ikut di dalamnya, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan keterasingan. Rakyat menjadi penonton pembangunan yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau nikmati.

Kecepatan tanpa arah kedaulatan hanya mempercepat jarak antara negara dan rakyat.

Mengulang Pola Lama dengan Nama Baru

Bangsa yang tidak membenahi struktur akan cenderung **mengulang pola lama dengan istilah baru**. Kekuasaan tetap terpusat, keputusan tetap elitis, dan rakyat tetap diminta percaya.

Indonesia Emas berisiko menjadi bab baru dari cerita lama jika:

- negara masih disamakan dengan pemerintah,
- kedaulatan rakyat hanya normatif,
- dan lembaga negara tidak benar-benar mewakili kehendak rakyat.

Dalam kondisi ini, Indonesia Emas bukan solusi, melainkan **kecelik yang dikemas rapi**.

Emas sebagai Ujian Moral dan Konstitusional

Indonesia Emas seharusnya dipahami sebagai **ujian**, bukan janji. Ujian apakah bangsa ini berani menempatkan rakyat sebagai pemilik negara, bukan sekadar objek kebijakan. Ujian apakah negara mau melayani, bukan menguasai.

Emas sejati bukan soal kekayaan, tetapi **kedaulatan yang bekerja**. Negara yang emas adalah negara yang rakyatnya merasa aman, dihormati, dan dilibatkan secara nyata dalam menentukan arah hidup bersama.

Pertanyaan yang Tidak Bisa Dihindari

Bab ini mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi perlu:

- Apakah Indonesia Emas akan menguatkan rakyat, atau hanya menguatkan negara?
- Apakah visi ini mengembalikan kedaulatan, atau sekadar memperindah prosedur?
- Apakah kita sedang keluar dari kecelik, atau justru menyiapkan kecelik berikutnya?

Tanpa jawaban jujur atas pertanyaan-pertanyaan ini, Indonesia Emas hanya akan menjadi **mimpi kolektif yang mudah pecah**.

Menyiapkan Jalan yang Berbeda

Indonesia Emas 2026 hanya bermakna jika ia menjadi **titik balik struktural**. Bukan sekadar percepatan, melainkan koreksi arah. Bukan sekadar pembangunan, melainkan pemulihan kedaulatan rakyat.

Indonesia Emas bukan tujuan akhir.
Ia adalah pertanyaan besar: **berani atau tidak bangsa ini berhenti kecelik?**

Dan dari keberanian itulah, jalan baru harus dimulai.

BAGIAN II
DIAGNOSIS: SALAH STRUKTUR, BUKAN SALAH ORANG

BAB 4
Negara, Pemerintah, dan Kekacauan Konsep

Negara ≠ Pemerintah



Gambar 12. Ilustrasi Negara Tidak Sama Dengan Pemerintah

Salah satu sumber kekacauan paling mendasar dalam kehidupan berbangsa Indonesia hari ini bukan terletak pada niat buruk, melainkan pada **kesalahan konsep yang dibiarkan berlarut-larut**. Kesalahan itu sederhana, tetapi dampaknya sistemik: **negara disamakan dengan pemerintah**.

Dalam ilmu ketatanegaraan, negara adalah entitas yang jauh lebih luas dan lebih permanen dibanding pemerintah. Negara terdiri dari **rakyat, wilayah, dan pemerintah**. Pemerintah hanyalah **alat operasional**, pelaksana mandat, yang keberadaannya bersifat **sementara dan dapat berganti**.

Namun dalam praktik sehari-hari di Indonesia, persepsi publik bahkan persepsi pemerintah, sering terbalik. Pemerintah diperlakukan seolah-olah negara itu sendiri. Kritik kepada pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Loyalitas kepada pejabat disamakan dengan patriotisme. Inilah awal dari kekacauan.

Ketika pemerintah diposisikan sebagai negara, maka negara kehilangan pemiliknya. Rakyat yang seharusnya menjadi sumber kedaulatan berubah menjadi penonton, sementara pengelola sementara merasa berhak bertindak sebagai pemilik.

Lembaga Negara ≠ Lembaga Pemerintah

Kekeliruan berikutnya adalah **menyamakan lembaga negara dengan lembaga pemerintah**. Padahal keduanya memiliki fungsi, legitimasi, dan sumber kewenangan yang berbeda.

Lembaga negara adalah institusi yang mewakili dan menjaga **kedaulatan rakyat serta keberlangsungan negara**. Ia tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Ia seharusnya berdiri di atas kepentingan rezim, periode jabatan, dan dinamika pemerintahan praktis.

Sebaliknya, lembaga pemerintah adalah bagian dari **mesin eksekutif**. Tugasnya menjalankan kebijakan, mengelola administrasi, dan melaksanakan keputusan negara. Ia bersifat operasional, teknis, dan terbatas oleh waktu.

Ketika dua jenis lembaga ini dicampuradukkan, yang terjadi adalah **pemusatan kekuasaan tanpa**

pengawasan yang sehat. Lembaga yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari yang diawasi.

Lembaga yang seharusnya netral terseret dalam kepentingan kekuasaan harian.

Dalam kondisi seperti ini, negara kehilangan rem, dan kekuasaan melaju tanpa penyeimbang.

Analogi Rumah Tangga: Kekeliruan Peran

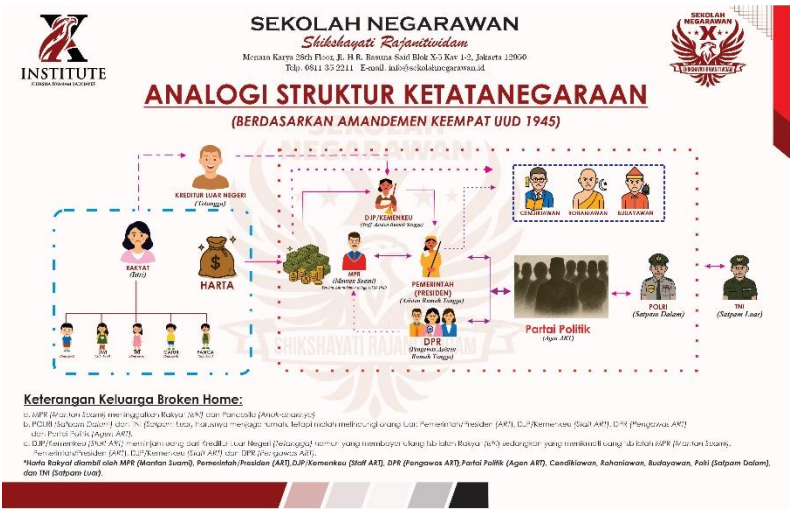

Gambar 13. Analogi Rumah Tangga Indonesia Saat Ini

Untuk memahami kekacauan ini secara sederhana, bayangkan negara sebagai sebuah keluarga.

- **Rakyat** adalah pemilik rumah sekaligus kepala rumah tangga.
- **Negara** adalah rumah dan tatanan hidup bersama.
- **Pemerintah** adalah asisten rumah tangga yang membantu mengurus, bukan menentukan arah hidup keluarga.

Masalah muncul ketika asisten rumah tangga mulai merasa sebagai pemilik rumah. Lebih parah lagi, ketika seluruh penghuni rumah ikut menganggapnya demikian. Pemilik rumah tidak lagi memegang kunci keputusan, sementara asisten merasa sah mengatur segalanya.

Dalam kondisi seperti ini, setiap kritik kepada asisten dianggap mengganggu "ketertiban rumah". Padahal yang terganggu justru **hak pemilik rumah**.

Akibat Ketika Semua Disatukan



Gambar 14. Ilustrasi Kekeliruan Peran Pemerintah

Ketika negara disamakan dengan pemerintah, dan lembaga negara dilebur dengan lembaga pemerintah, maka lahirlah berbagai dampak serius:

1. **Rakyat kehilangan posisi sebagai pemilik kedaulatan**

Rakyat hanya dipanggil saat pemilu, lalu disingkirkan dari pengambilan keputusan strategis.

2. **Pengawasan melemah**
   Tidak ada jarak sehat antara yang memerintah dan yang mengawasi. Kritik dianggap pembangkangan.
3. **Aparat salah memahami loyalitas**
   Kesetiaan diarahkan kepada kekuasaan, bukan kepada rakyat dan konstitusi.
4. **Hukum menjadi lentur ke atas, keras ke bawah**
   Karena hukum dijalankan oleh struktur yang menyatu dengan kekuasaan.
5. **Negara menjadi rapuh saat pemerintah gagal**
   Padahal negara seharusnya tetap kokoh meski pemerintahan berganti atau bahkan vakum sementara.

Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa **negara bisa tetap berjalan tanpa pemerintah definitif**, tetapi negara tidak pernah sah tanpa rakyat. Ini membuktikan bahwa pemerintah bukanlah inti negara, melainkan **penunjang**.

Akar Masalah Indonesia Hari Ini

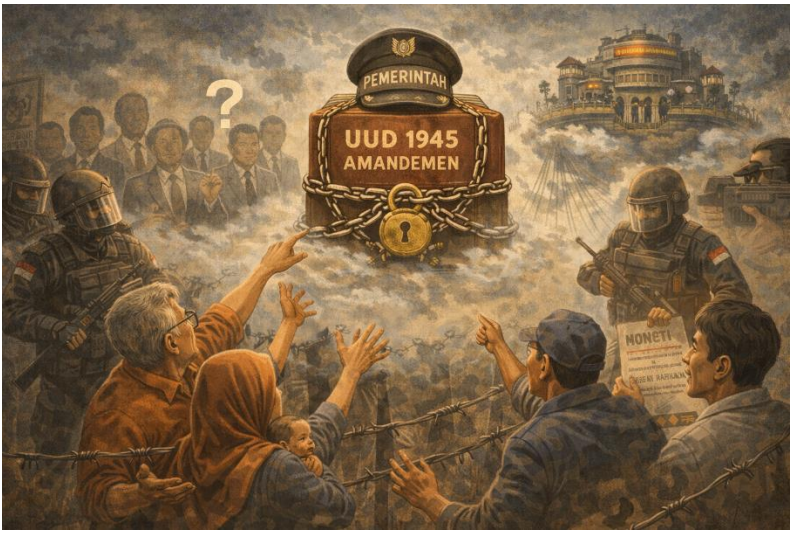

Gambar 15. Akar Masalah Indonesia Hari Ini

Kekacauan konsep ini diperparah oleh perubahan konstitusional yang mengaburkan pelaksana kedaulatan rakyat. Sejak itu, tidak ada lagi institusi yang secara tegas berdiri sebagai representasi langsung kedaulatan rakyat di atas pemerintah.

Akibatnya, pemerintah berjalan seolah tanpa majikan yang jelas. Pengawasan melemah. Rakyat kehilangan mekanisme perlindungan. Negara menjadi identik dengan rezim yang sedang berkuasa.

Inilah sebabnya berbagai persoalan dari hukum, birokrasi, pelayanan publik, hingga distribusi keadilan akan terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Masalahnya bukan semata pada orang, tetapi pada **arsitektur negara yang keliru**.

Menuju Indonesia Emas: Memulihkan Batas yang Hilang

Indonesia Emas tidak akan lahir dari sekadar pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik semu. Ia hanya mungkin terwujud jika bangsa ini **mengembalikan batas-batas konseptual yang benar**:

- Negara harus kembali dipahami sebagai milik rakyat.
- Pemerintah harus diposisikan sebagai pelaksana, bukan pemilik.
- Lembaga negara harus berdiri di atas lembaga pemerintah, bukan melebur dengannya.

Tanpa pembenahan konsep ini, setiap program, kebijakan, dan jargon kemajuan hanya akan menjadi lapisan cat di atas fondasi yang retak.

Bab ini menjadi pengingat bahwa **kemajuan tidak dimulai dari proyek, tetapi dari cara kita memahami negara itu sendiri**.

Dan Indonesia Emas hanya mungkin lahir dari negara yang kembali tertib secara konsep, adil secara struktur, dan jujur dalam menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

BAB 5
Negara sebagai Rumah, Rakyat sebagai Pemilik, Pemerintah sebagai Penghuni

Untuk memahami persoalan ketatanegaraan secara jernih, kita tidak selalu memerlukan istilah hukum yang rumit. Terkadang, **analogi rumah** justru mampu membuka kesadaran paling dasar tentang bagaimana negara seharusnya bekerja.

Dalam analogi ini, **negara bukan disamakan dengan pemerintah**, melainkan dipahami sebagai **rumah bersama**. Rumah itu memiliki pemilik, memiliki penghuni, memiliki aturan hidup, dan memiliki penjaga. Ketika peran-peran ini tertukar, rumah tetap berdiri, tetapi kehidupan di dalamnya menjadi kacau.



Gambar 16. Ilustrasi Rakyat yang Sukarela Memberikan Kunci Rumah ke Pemerintah

Negara sebagai Rumah

Negara adalah **rumah besar** tempat seluruh kehidupan berbangsa berlangsung. Rumah ini mencakup wilayah, hukum, tatanan sosial, dan kesepakatan hidup bersama. Negara bukan sekadar gedung pemerintahan atau simbol kekuasaan, melainkan **ruang hidup kolektif**.

Sebagaimana rumah:

- negara memiliki batas,
- negara memiliki aturan internal,
- dan negara dibangun untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan penghuninya.

Rumah tidak diciptakan untuk pengurus rumah. Rumah ada **demi pemiliknya**, dan hanya bermakna selama ia melindungi kepentingan pemilik tersebut.

Rakyat sebagai Pemilik Rumah

Dalam analogi ini, **rakyat adalah pemilik sah rumah bernama negara**. Rakyat membangun rumah itu melalui sejarah, pengorbanan, kekayaan alam, pajak, dan ketaatan pada aturan hidup bersama.

Sebagai pemilik rumah, rakyat memiliki hak yang tidak dapat dialihkan:

- menentukan arah hidup rumah,
- menetapkan aturan dasar,
- memilih siapa yang boleh tinggal dan bekerja di rumah,
- serta menegur atau mengganti penghuni yang melanggar aturan.

Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia hari ini, posisi pemilik rumah sering direduksi. Rakyat diperlakukan seolah hanya salah satu penghuni, bukan pemilik. Hak menentukan arah rumah semakin jauh dari tangan mereka.

Ketika pemilik rumah tidak lagi berdaulat, maka rumah itu rawan dikuasai oleh penghuni yang paling kuat.

Pemerintah sebagai Penghuni Rumah (Asisten Rumah Tangga)

Pemerintah, dalam analogi ini, adalah **penghuni rumah yang diberi tugas khusus** sebagai asisten rumah tangga. Ia tinggal di rumah negara karena **izin dan mandat pemilik**, bukan karena hak kepemilikan.
Sebagai penghuni:

- pemerintah bekerja mengurus kebutuhan sehari-hari rumah,
- menjalankan aturan yang ditetapkan pemilik,
- dan digaji dari sumber daya rumah.

Pemerintah adalah **penghuni fungsional**, bukan pemilik. Keberadaannya bersifat **penunjang dan kondisional**. Ia bisa diganti, dievaluasi, bahkan dihentikan, tanpa menghilangkan keberadaan rumah itu sendiri.

Masalah muncul ketika penghuni lupa statusnya. Ketika asisten rumah tangga mulai merasa sebagai pemilik rumah, dan sistem justru membenarkan perasaan itu, maka konflik tak terhindarkan. Kritik dianggap ancaman. Pengawasan dianggap gangguan.

Padahal yang sedang diperjuangkan adalah **hak pemilik rumah**.

Penghuni Lain dalam Rumah Negara

Selain pemerintah, ada banyak penghuni lain dalam rumah negara:

- pejabat publik,
- partai politik,
- birokrasi,
- bahkan institusi sosial dan budaya.

Semua adalah **penghuni**, bukan pemilik. Tidak satu pun berhak mengklaim rumah itu sebagai miliknya sendiri. Ketika sebagian penghuni merasa lebih berhak dibanding pemilik rumah, maka ketidakadilan menjadi sistemik.

TNI–Polri sebagai Penjaga Rumah

Setiap rumah memerlukan penjaga. Dalam negara, peran ini dijalankan oleh **TNI dan Polri**. Mereka bukan pemilik rumah dan bukan pengurus rumah, melainkan **penjaga ketertiban dan keamanan rumah**.

Penjaga rumah:

- bertugas melindungi rumah dari ancaman,
- memastikan aturan rumah ditegakkan,
- dan yang paling penting: **setia kepada rumah dan pemiliknya**, bukan kepada satu penghuni tertentu.

Ketika penjaga rumah salah memahami loyalitas dan lebih patuh kepada penghuni tertentu daripada

kepada pemilik rumah, maka keamanan berubah menjadi alat kekuasaan.

Ketika Rumah Negara Salah Kelola

Krisis ketatanegaraan Indonesia hari ini dapat dipahami sebagai krisis pengelolaan rumah:

- pemilik rumah tidak lagi memegang kendali penuh,
- penghuni mengatur rumah sesuka hati,
- penjaga bingung kepada siapa harus setia,
- aturan rumah diubah tanpa persetujuan pemilik.

Rumah masih berdiri, tetapi rasa keadilan, keamanan, dan kepercayaan perlahan runtuh.

Menuju Indonesia Emas: Menertibkan Rumah Negara

Indonesia Emas hanya mungkin terwujud jika **rumah negara ditertibkan kembali**:

- rakyat dikembalikan sebagai pemilik rumah yang berdaulat,
- pemerintah ditegaskan sebagai penghuni pelaksana, bukan penguasa,
- seluruh penghuni tunduk pada aturan pemilik,
- dan penjaga rumah berdiri netral demi keselamatan rumah dan rakyat.

Analogi ini menegaskan satu kebenaran mendasar:

Negara yang sehat adalah rumah yang menghormati pemiliknya.

Tanpa itu, kemajuan apa pun hanya akan menjadi dekorasi indah di rumah yang salah kelola.

BAB 6
Perceraian Konstitusional Rakyat dan MPR



Gambar 17. Ilustrasi Perceraian Konstitusional Rakyat dan MPR

Tidak semua perceraian terjadi di ruang keluarga. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada satu perceraian yang dampaknya jauh lebih luas dan berlangsung hingga hari ini: **perceraian konstitusional antara rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**.

Perceraian ini tidak disahkan oleh pengadilan agama atau sipil, melainkan oleh **perubahan konstitusi**. Ia terjadi secara formal, legal, dan sah menurut prosedur amandemen. Namun justru karena itu, dampaknya menjadi sistemik dan sering tidak disadari oleh publik.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945: Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Rumusan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Kedua, **pelaksanaan kedaulatan itu diamanatkan sepenuhnya kepada MPR**. Dengan demikian, MPR berfungsi sebagai **mandataris rakyat**, lembaga yang menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kedaulatan rakyat.

Setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, rumusan pasal tersebut berubah menjadi:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Sekilas, perubahan ini tampak netral, bahkan modern. Namun secara substansial, perubahan ini **menghilangkan subjek pelaksana kedaulatan**. Tidak ada lagi lembaga yang secara eksplisit menerima mandat rakyat untuk menjalankan kedaulatan itu.

Di sinilah perceraian konstitusional itu terjadi.

Hilangnya Mandataris Rakyat

Dengan dihapusnya frasa "dilakukan sepenuhnya oleh MPR", maka **MPR kehilangan posisi historis dan konstitusionalnya sebagai mandataris rakyat**. Ia tidak lagi berdiri sebagai lembaga tertinggi yang menerima dan mengemban kedaulatan rakyat.

Akibatnya, kedaulatan menjadi konsep normatif tanpa pengampu yang jelas. Ia berada "di tangan rakyat", tetapi **tidak dioperasionalkan melalui lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat**.

Dalam analogi rumah tangga, ini sama dengan pemilik rumah yang secara hukum tetap memiliki rumah, tetapi **tidak lagi menunjuk pengelola resmi**. Rumah tetap ada, pemilik tetap sah, tetapi pengambilan keputusan berjalan tanpa mandat yang jelas.

Kondisi ini menciptakan ruang kosong kekuasaan yang kemudian diisi oleh praktik kejahatan politik dan kekuatan eksekutif.

Rakyat Memiliki Kedaulatan, tetapi Tidak Menguasainya



Gambar 18. Ilustrasi Rakyat Indonesia Kehilangan Kedaulatan

Inilah paradoks terbesar ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen: **rakyat diakui sebagai pemilik kedaulatan, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk menguasai dan mengendalikan kedaulatan tersebut**.

Rakyat memilih wakil dan pemimpin, tetapi setelah itu:

- tidak memiliki sarana koreksi efektif,
- tidak memiliki lembaga pengawas tertinggi yang benar-benar mandiri dari pemerintah,
- dan tidak memiliki kontrol langsung atas arah kebijakan strategis negara.

Kedaulatan berubah menjadi simbol, bukan alat.

Ia menjadi slogan konstitusional tanpa daya paksa nyata.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah menyampaikan kritik yang sangat relevan: bahwa dalam kondisi seperti ini, **rakyat tidak dilindungi oleh siapa-siapa**. Bukan karena tidak ada lembaga, tetapi karena **lembaga-lembaga yang ada tidak lagi terikat langsung pada mandat kedaulatan rakyat**.

Dampak Sistemik Perceraian Konstitusional

Perceraian konstitusional ini melahirkan berbagai dampak berantai:

1. **MPR kehilangan peran strategis sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif**
   Ia berubah fungsi menjadi lembaga seremonial yang tidak lagi menjadi pusat arah kenegaraan.

2. **Presiden menguat tanpa pengawasan tertinggi**
   Kekuasaan eksekutif berjalan dengan kontrol yang terbatas dan terfragmentasi.
3. **Rakyat terpinggirkan dari pengambilan keputusan strategis**
   Partisipasi kejahatan politik berhenti pada pemilu, bukan berlanjut pada penguasaan kedaulatan.
4. **Negara kehilangan penopang moral dan konstitusional**
   Karena tidak ada lembaga yang secara tegas berdiri sebagai wakil kedaulatan rakyat di atas pemerintah.

Perceraian yang Tidak Pernah Dikonsultasikan

Yang paling problematis dari perceraian ini adalah kenyataan bahwa **rakyat tidak pernah secara langsung dimintai persetujuan**. Tidak ada referendum, tidak ada musyawarah rakyat, tidak ada mandat eksplisit.

Perubahan konstitusi yang sedemikian mendasar justru berlangsung di ruang elite, dengan asumsi bahwa perubahan prosedural otomatis membawa demokrasi yang lebih baik.

Sejarah kemudian menunjukkan bahwa asumsi itu tidak sepenuhnya benar.

Menuju Rekonsiliasi Konstitusional

Bab ini bukan dimaksudkan untuk nostalgia terhadap masa lalu, melainkan untuk membuka ruang

refleksi: **apakah sistem hari ini benar-benar menjamin kedaulatan rakyat, atau justru mengurungnya dalam simbol?**

Jika Indonesia ingin melangkah menuju **Indonesia Emas**, maka perceraian konstitusional ini perlu dievaluasi secara jujur. Bukan untuk memutar waktu, tetapi untuk **menemukan kembali mekanisme penguasaan kedaulatan oleh rakyat**.

Tanpa rekonsiliasi antara rakyat dan mandatarisnya, negara akan terus berjalan dalam paradoks: demokratis secara prosedural, tetapi rapuh secara substantif.

BAGIAN III
KRITIK KONSTITUSIONAL:
AMANDEMEN YANG MENYIMPANG

BAB 7
Amandemen UUD 1945: Dari Koreksi ke Distorsi



Gambar 19. Ilustrasi MPR RI yang Kehilangan Peran Sebagai Kepala Negara

Reformasi konstitusi lahir dari semangat yang mulia. Ia dimaksudkan sebagai **koreksi atas penyimpangan kekuasaan**, bukan sebagai pembongkaran fondasi negara. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu berakhir pada hasil yang tepat. Dalam kasus Indonesia, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bergerak dari upaya pembenahan menuju **distorsi struktur ketatanegaraan**.

Bab ini menelusuri bagaimana perubahan konstitusi yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan justru **menggeser keseimbangan** dan melemahkan mekanisme kedaulatan rakyat.

Niat Awal Reformasi Konstitusi

Di awal reformasi, amandemen UUD 1945 dipandang sebagai jalan keluar dari praktik kekuasaan yang terlalu terpusat. Presiden dianggap terlalu dominan, kontrol terhadap eksekutif lemah, dan ruang partisipasi politik terbatas. Maka tujuan utama reformasi konstitusi adalah:

- membatasi masa jabatan presiden,
- memperkuat checks and balances,
- menjamin hak asasi manusia,
- serta mencegah kembalinya otoritarianisme.

Dalam konteks ini, amandemen dipahami sebagai **koreksi** bukan penggantian sistem negara. Konstitusi tetap UUD 1945, bukan konstitusi baru. Artinya, semangat dasar pembukaan dan kedaulatan rakyat seharusnya tetap utuh.

Namun dalam prosesnya, perubahan tidak hanya menyentuh praktik kekuasaan, melainkan **mengubah arsitektur dasar hubungan antar-lembaga negara**.

Pergeseran Kekuasaan ke Presiden



Gambar 20. Ilustrasi Pergeseran Kekuasaan ke Presiden

Salah satu dampak paling nyata dari rangkaian amandemen adalah **penguatan posisi presiden**. Dengan pemilihan langsung, presiden memperoleh legitimasi elektoral yang sangat kuat. Di sisi lain, tidak ada lembaga negara yang berdiri di atas presiden sebagai penerima dan pengendali mandat kedaulatan rakyat.

Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai mandataris rakyat, melainkan langsung kepada rakyat secara abstrak melalui pemilu lima tahunan. Konsekuensinya, pertanggungjawaban menjadi **jauh dan tidak operasional**. Rakyat memilih, tetapi tidak mengawasi secara institusional.

Dalam situasi ini, presiden berubah dari pelaksana mandat menjadi **pusat gravitasi kekuasaan**.

Kekuasaan eksekutif menguat, sementara mekanisme koreksi menjadi terfragmentasi dan politis.

Ironisnya, penguatan ini terjadi justru atas nama demokrasi.

MPR Kehilangan Fungsi Kepala Negara

Perubahan paling fundamental terjadi pada posisi MPR. Dari lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat, MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara dengan kewenangan terbatas dan bersifat seremonial.

MPR tidak lagi:

- menetapkan arah besar negara secara aktif,
- mengawasi presiden sebagai mandataris,
- atau menjadi pusat pertanggungjawaban kekuasaan.

Fungsi kepala negara yang secara konseptual melekat pada MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat yang hilang tanpa pernah benar-benar diperdebatkan secara luas di ruang publik.

Dalam analogi rumah tangga, **kepala keluarga dicopot perannya**, sementara pengelola harian justru memperoleh legitimasi langsung untuk menentukan arah rumah. Rumah tetap berdiri, tetapi struktur kepemimpinannya menjadi kabur.

Distorsi yang Dianggap Normal

Yang membuat distorsi ini berbahaya adalah kenyataan bahwa ia berlangsung **secara legal dan prosedural**. Tidak ada kudeta. Tidak ada pelanggaran

formal. Semuanya sah menurut mekanisme amandemen.

Namun sah secara prosedur tidak selalu berarti benar secara substansi.

Perubahan yang menghilangkan mandataris rakyat, mengaburkan pelaksanaan kedaulatan, dan memperkuat eksekutif tanpa pengawas tertinggi, perlahan dianggap sebagai kenormalan baru. Generasi berikutnya tumbuh tanpa pernah mengenal struktur kedaulatan yang utuh.

Distorsi lalu diwariskan sebagai sistem.

Dari Koreksi ke Masalah Baru

Alih-alih memperkuat kedaulatan rakyat, amandemen justru melahirkan paradoks:

- Presiden dibatasi masa jabatan, tetapi tidak diawasi secara substantif.
- Rakyat diberi hak memilih langsung, tetapi kehilangan alat kontrol kelembagaan.
- MPR dipertahankan secara simbolik, tetapi dilucuti fungsinya secara strategis.

Negara menjadi demokratis secara prosedural, tetapi **rapuh secara struktural**.

Pelajaran untuk Indonesia Emas

Bab ini tidak dimaksudkan untuk menolak reformasi atau meromantisasi masa lalu. Ia justru mengajak untuk **bersikap jujur terhadap hasil perubahan**. Jika tujuan reformasi adalah membangun

negara yang adil dan berdaulat, maka distorsi yang terjadi harus diakui terlebih dahulu.

Indonesia Emas tidak dapat dibangun di atas arsitektur negara yang timpang. Koreksi terhadap koreksi menjadi keniscayaan. Bukan untuk mengulang kesalahan lama, tetapi untuk **memulihkan keseimbangan kedaulatan rakyat**.

BAB 8
Presiden sebagai Asisten Rumah Tangga



Gambar 21. Ilustrasi Presiden sebagai Asisten Rumah Tangga

Dalam perdebatan kekuasaan di Indonesia, jabatan presiden sering ditempatkan di puncak segalanya. Presiden diperlakukan sebagai simbol negara, pusat kekuasaan, sekaligus penentu arah hidup bangsa. Namun jika ditelusuri secara konseptual dan konstitusional, posisi presiden sesungguhnya **bukan kepala negara dalam makna kedaulatan**, melainkan **kepala pemerintahan** sebagai pelaksana kerja harian negara.

Kesalahan memahami posisi inilah yang melahirkan banyak persoalan dalam praktik bernegara.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Negara

Dalam struktur negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, **kepala negara adalah representasi kedaulatan**, bukan pelaksana administrasi. Kepala pemerintahan bertugas menjalankan roda eksekutif: mengelola birokrasi, menyusun kebijakan, dan memastikan pelayanan publik berjalan.

Presiden berada di wilayah kedua ini. Ia memimpin pemerintahan, bukan negara sebagai pemilik kedaulatan. Presiden bekerja untuk negara, bukan negara bekerja untuk presiden.

Dalam analogi rumah:

- **negara** adalah rumah,
- **rakyat** adalah pemilik rumah,
- **presiden** adalah asisten rumah tangga yang ditugaskan mengurus kebutuhan sehari-hari.

Asisten rumah tangga bisa sangat penting, bahkan menentukan kenyamanan rumah. Tetapi ia **bukan pemilik rumah** dan **bukan penentu arah hidup keluarga**.

Kritik Cak Nun: "Presiden Itu Outsourcing"

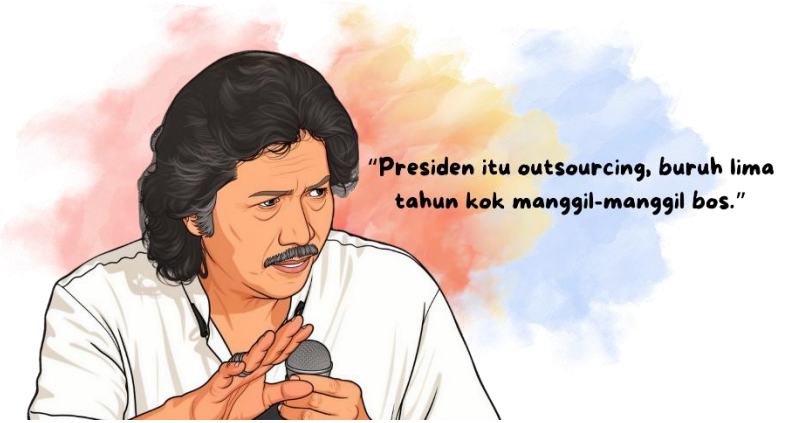

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dengan lugas menyebut posisi presiden sebagai **outsourcing**. Pernyataan ini bukan untuk merendahkan jabatan, melainkan untuk **menempatkannya secara tepat**.
Outsourcing berarti:

- direkrut untuk tugas tertentu,
- bekerja dalam jangka waktu terbatas,
- digaji oleh pemilik,
- dan dapat dievaluasi atau diganti jika tidak menjalankan amanat.

Presiden dipilih lima tahunan, digaji dari uang rakyat, dan diberi mandat terbatas. Ia bukan raja, bukan pemilik, dan bukan pusat kedaulatan. Ketika presiden lupa bahwa dirinya adalah pekerja publik, maka kekuasaan berubah arah: dari melayani menjadi menguasai.

Cak Nun mengingatkan bahwa presiden bukan pihak yang layak "memanggil-manggil bos". Justru rakyatlah yang berhak memanggil dan menilai

presiden, karena rakyatlah yang menggaji dan memberi mandat.

Bahaya Presiden Tanpa Pengawas Struktural

Masalah terbesar Indonesia pasca-amandemen bukan sekadar presiden yang kuat, tetapi **presiden yang kuat tanpa pengawas struktural yang jelas**.

Ketika MPR kehilangan fungsi sebagai mandataris rakyat, tidak ada lagi lembaga negara yang secara tegas berdiri di atas presiden sebagai pengendali kedaulatan. Pengawasan kemudian bergeser ke:

- parlemen yang terikat kepentingan segelintir orang,
- lembaga hukum yang berada dalam ekosistem kekuasaan,
- serta mekanisme elektoral yang bersifat periodik dan jauh.

Dalam analogi rumah, ini seperti asisten rumah tangga yang bekerja tanpa pemilik rumah yang hadir secara aktif. Evaluasi hanya dilakukan lima tahun sekali, sementara setiap hari keputusan tetap diambil oleh asisten tersebut.

Kondisi ini berbahaya karena:

1. **Kekuasaan cenderung membesar tanpa koreksi harian**
2. **Kebijakan strategis lepas dari kendali pemilik kedaulatan**
3. **Kesalahan sistemik sulit dihentikan di tengah jalan**

Presiden bisa saja berniat baik, tetapi **sistem yang salah akan mendorong penyalahgunaan**, bahkan tanpa niat jahat.

Personalisasi Kekuasaan



Gambar 22. Ilustrasi Personalisasi Kekuasaan

Tanpa pengawas struktural, kekuasaan eksekutif mudah terpersonalisasi. Negara diidentikkan dengan presiden. Kritik terhadap kebijakan dibaca sebagai serangan terhadap negara. Loyalitas kepada pejabat dianggap sebagai nasionalisme.

Inilah tanda klasik negara yang kehilangan keseimbangan. Ketika presiden diperlakukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka **seluruh rumah negara berputar pada satu penghuni**.

Pelajaran Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas tidak membutuhkan presiden yang dipuja, tetapi presiden yang **bekerja dalam struktur yang benar**. Presiden yang kuat secara operasional, tetapi **dibatasi dan diawasi secara konstitusional**.

Menempatkan presiden sebagai asisten rumah tangga bukanlah penghinaan, melainkan **pemulihan logika kedaulatan rakyat**. Presiden adalah pelayan publik tertinggi, bukan pemilik negara.

Bab ini menegaskan satu prinsip dasar: **Negara yang sehat bukan negara yang tunduk pada presidennya, melainkan negara di mana presiden tunduk pada kedaulatan rakyat.**



Gambar 23. Ilustrasi Presiden Tunduk ke Rakyat

BAB 9
Aparat Bingung: Menjaga Rakyat atau Kekuasaan



Gambar 24. Ilustrasi Aparat Bingung: Menjaga Rakyat atau Kekuasaan

Dalam negara yang sehat, aparat keamanan tidak pernah bingung tentang satu hal mendasar: **siapa yang mereka jaga**. Jawabannya sederhana dan tegas yaitu rakyat dan negara. Namun ketika struktur ketatanegaraan kabur, kebingungan itu justru menjadi keniscayaan. Bukan karena aparat tidak profesional, melainkan karena **sistem gagal memberikan rambu yang jelas**.

TNI–Polri dalam Struktur yang Kabur

Secara konstitusional, TNI dan Polri adalah alat negara. Mereka bukan alat pemerintah, apalagi alat kekuasaan segelintir orang. Namun dalam praktik, perbedaan antara **negara** dan **pemerintah** sering kali tidak tegas. Ketika negara dipersepsikan identik dengan pemerintah yang sedang berkuasa, maka aparat keamanan pun terseret ke dalam loyalitas yang keliru.

Dalam struktur yang sehat:

- negara bersifat permanen,
- pemerintah bersifat sementara,
- dan aparat berdiri untuk melindungi yang permanen dari kepentingan yang sementara.

Namun dalam struktur yang kabur, garis ini menghilang. Aparat dihadapkan pada dilema praktis: perintah datang dari kekuasaan harian, sementara mandat konstitusional menyebutkan perlindungan terhadap rakyat. Ketika tidak ada pengawas struktural yang kuat, kebingungan ini tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Ketika Satpam Salah Mengenali Majikan

Dalam analogi rumah, TNI dan Polri adalah **satpam rumah negara**. Satpam bertugas menjaga rumah dan melindungi pemiliknya. Ia tidak bekerja untuk menyenangkan asisten rumah tangga, apalagi tunduk pada kehendak pribadi penghuni tertentu.

Masalah muncul ketika satpam mulai menganggap asisten rumah tangga sebagai majikan. Perintah sehari-hari dari pengelola rumah menjadi lebih

dominan dibanding amanat pemilik rumah. Dalam situasi ini, satpam tidak lagi bertanya apakah perintah itu adil, melainkan apakah perintah itu sah secara hierarki.

Kesalahan mengenali majikan ini tidak selalu disebabkan niat buruk. Ia sering lahir dari **ketiadaan struktur pengarah yang tegas**. Ketika tidak ada lembaga negara yang berdiri jelas sebagai representasi kedaulatan rakyat, maka loyalitas aparat cenderung mengalir ke pusat kekuasaan yang paling dekat dan paling nyata.



Gambar 25. Ilustrasi TNI-Polri Sebagai Penjaga Rumah

Dampak terhadap Keadilan

Kebingungan loyalitas aparat berdampak langsung pada keadilan. Penegakan hukum berisiko kehilangan objektivitas. Perlakuan berbeda muncul

antara kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan mereka yang berada di luar lingkaran itu.
Dalam kondisi ini:

- hukum terasa tegas ke bawah, tetapi lentur ke atas,
- kritik mudah dicurigai sebagai gangguan keamanan,
- dan keadilan menjadi relatif, bukan prinsip.

Aparat berada di posisi sulit: menjalankan tugas sambil menavigasi tekanan pejabat, opini publik, dan perintah struktural yang tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan substantif.

Dampak terhadap Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil adalah indikator penting kesehatan negara. Ketika aparat bingung menentukan siapa yang harus dijaga, kebebasan sipil sering menjadi korban pertama. Demonstrasi dipandang sebagai ancaman, ekspresi kritis dianggap gangguan stabilitas, dan perbedaan pendapat dihadapi dengan pendekatan keamanan.

Bukan karena aparat membenci kebebasan, tetapi karena **struktur negara tidak memberi batas yang jelas antara kritik terhadap pemerintah dan ancaman terhadap negara**. Akibatnya, ruang demokrasi menyempit bukan oleh larangan resmi, melainkan oleh rasa takut dan kewaspadaan berlebihan.

Aparat sebagai Korban Sistem

Penting untuk ditegaskan: dalam banyak kasus, aparat bukan pelaku utama kekacauan, melainkan **korban dari sistem yang tidak tertata**. Mereka bekerja dalam struktur yang meminta loyalitas ganda tanpa memberikan kompas yang tegas.

Ketika struktur negara tidak sehat, bahkan institusi paling disiplin sekalipun akan mengalami distorsi fungsi.

Pelajaran Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas hanya mungkin terwujud jika aparat keamanan bekerja dalam struktur yang jelas dan adil. Itu berarti:

- negara harus dibedakan tegas dari pemerintah,
- rakyat harus ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan,
- dan aparat harus dilindungi dari tarik-menarik kepentingan segelintir orang.

Menjernihkan posisi TNI–Polri bukan sekadar demi kebebasan sipil, tetapi juga demi **martabat institusi itu sendiri**. Satpam yang tahu siapa majikannya akan bekerja dengan tenang, adil, dan profesional.

Bab ini menegaskan bahwa kekacauan keamanan bukan semata persoalan aparat, melainkan **cermin dari kekacauan struktur negara**. Tanpa pembenahan mendasar, kebingungan ini akan terus berulang, dan yang dirugikan adalah rakyat sebagai pemilik rumah negara.

BAGIAN IV
SOLUSI PEMULIHAN KEDAULATAN RAKYAT

BAB 10
Menikahkan Kembali Rakyat dan MPR

Setelah perceraian konstitusional yang memisahkan rakyat dari mandatarisnya, bangsa ini hidup dalam keadaan yang tampak normal, tetapi sesungguhnya timpang. Negara tetap berjalan, pemerintahan berganti, pemilu berlangsung rutin, namun **kedaulatan rakyat kehilangan rumahnya**. Bab ini membahas satu gagasan kunci untuk pemulihan: **menikahkan kembali rakyat dan MPR** dalam struktur ketatanegaraan yang sehat dan berdaulat.

Pernikahan ini bukan metafora romantik, melainkan **rekonstruksi konstitusional** yaitu pengembalian hubungan mandat, tanggung jawab, dan perlindungan antara pemilik kedaulatan dan lembaga pelaksananya.



Gambar 26. Ilustrasi MPR dan Rakyat Menikah Kembali

MPR sebagai Kepala Negara

Dalam negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, **kepala negara** bukanlah pengelola harian, melainkan **penjaga mandat kedaulatan**. Kepala negara berdiri di atas pemerintah, bukan untuk mengatur detail operasional, tetapi untuk memastikan arah besar negara tetap setia pada kehendak rakyat.

Di sinilah **MPR** menemukan kembali peran historis dan konstitusionalnya. MPR bukan sekadar forum seremonial atau lembaga ad hoc, melainkan **representasi kedaulatan rakyat** yang bertugas:

- menetapkan haluan besar negara,
- mengawasi pemerintah sebagai pelaksana,
- dan memastikan konstitusi dijalankan sesuai tujuan pembukaan.

Menempatkan MPR sebagai kepala negara berarti **mengembalikan pusat gravitasi kekuasaan** dari individu dan pemerintahan sementara ke lembaga yang menerima mandat langsung dari rakyat.

Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan

Rakyat bukan sekadar pemilih periodik. Rakyat adalah **pemilik sah negara**. Kepemilikan ini bukan simbolik, melainkan substantif yang meliputi hak menentukan arah, mengoreksi penyimpangan, dan menuntut pertanggungjawaban.

Menikahkan kembali rakyat dan MPR berarti:

- rakyat **menguasai** kedaulatannya, bukan hanya memilikinya di atas kertas;

- kedaulatan tidak berhenti pada pemilu, tetapi hidup dalam pengawasan dan koreksi berkelanjutan;
- aspirasi rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan strategis melalui mekanisme negara, bukan sekadar janji pejabat.

Dalam hubungan ini, rakyat bukan objek pembangunan, melainkan **subjek penentu**.

Negara sebagai Organisasi Milik Rakyat

Jika kedaulatan telah dipulihkan relasinya, maka negara harus dipahami ulang sebagai **organisasi milik rakyat**. Seperti organisasi modern yang sehat, negara memiliki:

- **pemilik** (rakyat),
- **dewan pengarah** (MPR sebagai kepala negara),
- **manajemen eksekutif** (pemerintah),
- dan **unit pengamanan serta kepatuhan** (aparat dan lembaga hukum).

Dalam organisasi milik rakyat:

- tujuan utama adalah kesejahteraan pemilik,
- tata kelola dibangun atas akuntabilitas,
- dan pengelola bertanggung jawab kepada pemilik, bukan sebaliknya.

Konsep ini menutup celah personifikasi kekuasaan dan mencegah negara dikuasai oleh kepentingan sempit, baik sosial, ekonomi, maupun oligarkis.

Mengakhiri Kekacauan Konsep

Menikahkan kembali rakyat dan MPR menyelesaikan kekacauan konseptual yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya:

- negara tidak lagi disamakan dengan pemerintah,
- lembaga negara dibedakan tegas dari lembaga pemerintah,
- presiden kembali ditempatkan sebagai kepala pemerintahan, bukan kepala negara,
- dan aparat keamanan mendapatkan kompas loyalitas yang jelas: **negara dan rakyat**.

Dengan struktur ini, pengawasan menjadi nyata, bukan politis. Kekuasaan menjadi terdistribusi, bukan terpusat. Dan rakyat kembali dilindungi, bukan sekadar dilayani.

Dari Simbol ke Substansi

Selama ini, kedaulatan rakyat sering diperlakukan sebagai simbol yang disebutkan dalam konstitusi, tetapi tidak dioperasionalkan. Bab ini menegaskan bahwa **kedaulatan harus bekerja**, bukan hanya dibacakan.

Pernikahan konstitusional rakyat dan MPR mengubah kedaulatan dari slogan menjadi sistem. Ia mengikat mandat, menciptakan mekanisme koreksi, dan menghidupkan kembali tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB 11
Negara sebagai Organisasi Modern

Jika negara ingin dikelola secara rasional, akuntabel, dan berkelanjutan, maka ia harus dipahami bukan sebagai panggung kekuasaan, melainkan sebagai organisasi modern milik rakyat. Organisasi ini memiliki tujuan, struktur, tata kelola, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas sebagaimana organisasi profesional pada umumnya.

Melalui analogi ini, kedaulatan rakyat tidak lagi berhenti sebagai slogan konstitusional, tetapi bekerja nyata dalam sistem.



Gambar 27. Struktur Negara Ideal Sesuai Draft Amandemen Kelima

UUD sebagai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

Dalam organisasi modern, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (AD/ART) adalah dokumen tertinggi yang:

- menetapkan tujuan organisasi,
- menentukan struktur kewenangan,
- membatasi kekuasaan pengelola,
- serta melindungi hak pemilik.

Dalam negara, fungsi ini dijalankan oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD bukan sekadar kumpulan pasal hukum, melainkan kontrak dasar antara rakyat sebagai pemilik dengan pengelola negara.

Ketika UUD dibaca dan dijalankan secara konsisten, tidak ada satu pun pengelola, termasuk presiden yang dapat bertindak di luar mandat. Sebaliknya, ketika UUD ditafsirkan longgar dan berubah tanpa kerangka kedaulatan yang jelas, negara kehilangan disiplin organisasionalnya.

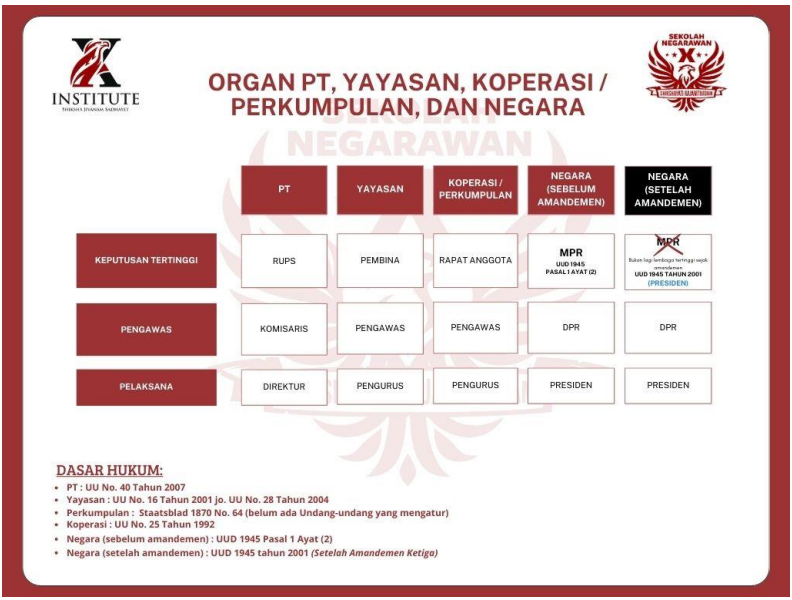

Gambar 28. Infografis Organ PT, Yayasan, Koperasi/Perkumpulan, dan Negara

Rakyat sebagai Pemegang Saham

Dalam organisasi modern, pemegang saham adalah pemilik sah. Mereka menanamkan modal, menanggung risiko, dan berhak menentukan arah perusahaan. Dalam negara, posisi ini ditempati oleh rakyat.

Rakyat "menanamkan modal" melalui:

- pajak,
- kekayaan alam,
- tenaga kerja,
- serta kepatuhan terhadap hukum.

Sebagai pemegang saham, rakyat berhak:

- mengetahui kinerja pengelola,
- meminta pertanggungjawaban,

- mengoreksi arah kebijakan,
- dan mengganti manajemen yang gagal.

Demokrasi yang sehat bukan hanya memberi hak memilih, tetapi memberi hak menguasai. Jika rakyat hanya memilih tanpa bisa mengendalikan, maka mereka bukan pemilik melainkan konsumen untuk segelintir orang.

MPR sebagai RUPS

Dalam struktur organisasi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum tertinggi. Di sinilah pemilik menetapkan arah strategis, mengevaluasi manajemen, dan mengambil keputusan fundamental.

Dalam negara, fungsi ini idealnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai representasi kedaulatan rakyat, MPR berperan:

- menetapkan haluan negara,
- menilai kinerja pemerintahan,
- menjaga agar UUD dijalankan sesuai tujuan pendirian negara.

Menempatkan MPR sebagai RUPS negara berarti menghidupkan kembali forum pemilik. Tanpa RUPS yang berfungsi, organisasi akan dikuasai oleh manajemen, bukan oleh pemiliknya.

Presiden sebagai CEO

Dalam analogi organisasi, presiden adalah *Chief Executive Officer* (CEO). Ia memimpin operasional harian, mengelola sumber daya, dan menjalankan strategi yang ditetapkan pemilik melalui RUPS.

Sebagai CEO:

- presiden bekerja berdasarkan mandat,
- memiliki masa jabatan terbatas,
- digaji oleh organisasi,
- dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

CEO yang baik tidak mengklaim perusahaan sebagai miliknya. Ia sukses justru ketika kepentingan pemilik terlayani dan organisasi tumbuh sehat.

Bahaya muncul ketika CEO tidak diawasi oleh RUPS yang kuat. Dalam kondisi itu, perusahaan bisa berubah menjadi alat kepentingan manajemen, bukan pemilik. Analogi inilah yang menjelaskan mengapa penguatan presiden tanpa pengawasan struktural berbahaya bagi kedaulatan rakyat.

Akuntabilitas sebagai Jantung Organisasi Negara

Organisasi modern hidup dari akuntabilitas. Setiap keputusan harus dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Negara pun demikian.

Dengan struktur:

- UUD sebagai Akta Pendirian,

- rakyat sebagai pemegang saham,
- MPR sebagai RUPS,
- presiden sebagai CEO,

maka akuntabilitas tidak lagi bersifat moral atau politis semata, melainkan struktural dan sistemik.

Tidak ada kultus individu. Tidak ada kekuasaan absolut. Yang ada adalah tata kelola.

Menuju Negara yang Profesional dan Berdaulat

Bab ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak bertentangan dengan profesionalisme negara. Justru sebaliknya, kedaulatan hanya dapat bekerja jika negara dikelola secara modern.

Negara yang dipahami sebagai organisasi milik rakyat:

- lebih tahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan,
- lebih adaptif terhadap perubahan,
- dan lebih adil dalam melayani pemiliknya.

Indonesia Emas tidak lahir dari figur kuat, melainkan dari sistem yang benar. Sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik, konstitusi sebagai kontrak dasar, dan pemerintah sebagai manajemen yang bekerja bukan berkuasa.

BAB 12
MPR Tanpa Partai Politik

Jika MPR hendak dikembalikan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan berfungsi sebagai "RUPS negara", maka satu pertanyaan mendasar tidak bisa dihindari: **apakah partai politik layak menguasai MPR?**

Bab ini mengajukan jawaban tegas: **tidak**. Bukan karena partai jahat, melainkan karena **fungsi partai tidak selaras dengan fungsi MPR sebagai lembaga kedaulatan**.



Gambar 29. MPR Tanpa Partai Politik

Mengapa Partai Tidak Layak Menguasai MPR

Partai politik diciptakan untuk **merebut dan mengelola kekuasaan pemerintahan**. Ia bekerja dalam logika kompetisi, elektabilitas, koalisi, dan kepentingan jangka pendek. Partai hidup dari siklus pemilu dan

strategi menang-kalah. Fungsi ini sah dan perlu dalam demokrasi, tetapi **tidak cocok untuk lembaga kedaulatan**.

MPR, sebagai representasi pemilik negara, seharusnya:

- berdiri di atas siklus elektoral,
- tidak terikat kepentingan pemerintahan harian,
- dan fokus pada arah besar negara.

Ketika MPR dikuasai partai politik, terjadi konflik kepentingan yang inheren. Lembaga yang seharusnya mengawasi dan mengarahkan justru **terikat pada kepentingan pemerintahan yang diusungnya sendiri**. Akibatnya, MPR kehilangan independensi dan berubah menjadi perpanjangan kekuasaan eksekutif.
Ini bukan kesalahan individu, melainkan **kesalahan desain**.

Kedaulatan Tidak Bisa Dikelola dengan Logika Pemilu

Kedaulatan rakyat adalah urusan jangka panjang. Ia menyangkut haluan negara, integritas konstitusi, dan kepentingan lintas generasi. Logika pemilu yang menuntut respons cepat, popularitas, dan kompromi pejabat, tidak memadai untuk mengelola mandat sebesar itu.

Ketika kedaulatan dikelola dengan logika pemilu:

- arah negara mudah berubah mengikuti rezim,
- keputusan strategis tunduk pada kalkulasi elektoral,

- dan kepentingan jangka panjang dikorbankan demi stabilitas sesaat.

MPR yang sehat harus **kebal dari tarik-menarik kekuasaan segelintir orang**. Ia harus menjadi jangkar negara, bukan layar kampanye.

Peran Cendekiawan, Rohaniawan, dan Budayawan



Gambar 30. MPR terdiri dari Cendekiawan, Rohaniawan, dan Budayawan

Jika partai politik tidak layak mendominasi MPR, lalu siapa yang seharusnya mengisinya? Bab ini mengusulkan tiga unsur utama: **cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan** bukan sebagai elite baru, melainkan sebagai **penjaga nurani dan arah bangsa**.

1. **Cendekiawan**

   Mereka membawa rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca dampak jangka panjang kebijakan. Cendekiawan

berperan menjaga agar negara berjalan berdasarkan akal sehat dan data, bukan emosi pejabat.

2. **Rohaniawan**
   Mereka menjaga dimensi moral dan etika publik. Rohaniawan tidak dimaksudkan untuk membawa doktrin sektarian, melainkan untuk memastikan kekuasaan tidak tercerabut dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab spiritual.
3. **Budayawan**
   Mereka menjaga kontinuitas identitas bangsa. Budaya adalah memori kolektif yang mencegah negara kehilangan arah di tengah modernisasi. Budayawan memastikan bahwa kemajuan tidak menghapus jati diri.

Ketiga unsur ini tidak bersaing dalam pemilu, tidak berebut jabatan eksekutif, dan relatif **lebih independen dari kepentingan kekuasaan harian**. Inilah yang membuat mereka relevan untuk lembaga kedaulatan.

TNI–Polri sebagai Penjaga Negara, Bukan Pemerintah

Dalam desain MPR tanpa partai, posisi TNI–Polri perlu ditegaskan secara jernih. Mereka **bukan aktor pemerintah**, bukan pengambil kebijakan, dan bukan penentu arah negara. Peran mereka adalah **penjaga negara** untuk keamanan, kedaulatan, dan ketertiban.

Keterlibatan TNI–Polri dalam MPR, jika ada, harus bersifat:

- institusional, bukan politis,

- netral, bukan partisan,
- dan terbatas pada fungsi penjagaan konstitusi dan keutuhan negara.

Dengan penegasan ini, TNI–Polri dilindungi dari politisasi dan tarik-menarik kepentingan. Mereka tidak lagi ditempatkan dalam posisi ambigu antara menjaga rakyat atau kekuasaan.



Gambar 31. MPR sebagai Forum Kebijaksanaan

MPR sebagai Forum Kebijaksanaan, Bukan Arena Kekuasaan

MPR tanpa partai politik bukan berarti anti-demokrasi. Justru sebaliknya, ia **melengkapi demokrasi elektoral** dengan demokrasi kebijaksanaan. Partai tetap berperan di ranah pemerintahan dan parlemen

operasional. MPR berdiri di atasnya sebagai penjaga arah dan nilai.

Dengan komposisi non-partisan:

- MPR menjadi forum musyawarah sejati,
- keputusan strategis diambil dengan perspektif lintas generasi,
- dan kedaulatan rakyat dijalankan secara substansial.

Menuju Negara yang Tertib dan Bermartabat

Bab ini menegaskan bahwa pemulihan kedaulatan rakyat tidak cukup dengan mengubah pasal, tetapi harus **mengubah siapa yang memegang peran kunci**. MPR yang bebas dari dominasi partai politik adalah syarat penting untuk menata ulang negara sebagai organisasi milik rakyat.

Indonesia Emas membutuhkan negara yang:

- kuat secara struktur,
- jernih secara konsep,
- dan bermartabat secara etika.

MPR tanpa partai politik bukan nostalgia masa lalu, melainkan **desain masa depan** agar kedaulatan rakyat benar-benar bekerja, bukan sekadar disebutkan.

BAGIAN V
JALAN PERUBAHAN: DARI GAGASAN KE TRANSISI

BAB 13
Enam Opsi Menuju Rakyat Kembali Berdaulat

Pemulihan kedaulatan rakyat tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia selalu berlangsung melalui **jalan politik dan konstitusional** yang membawa konsekuensi berbeda. Bab ini memetakan **enam opsi** yang secara teoretis dan historis pernah ditempuh bangsa-bangsa untuk merombak struktur negara ketika legitimasi kedaulatan dianggap menyimpang.

Pemetaan ini **bukan ajakan**, melainkan **analisis komparatif** agar keputusan publik, jika suatu saat diambil, bersandar pada pengetahuan, bukan emosi.



Gambar 32. Enam Opsi Menuju Rakyat Kembali Berdaulat

1. Dekrit Presiden



Gambar 33. Ilustrasi Dekrit Presiden

Pengertian

Dekrit adalah tindakan eksekutif luar biasa untuk mengatasi kebuntuan sistemik ketika mekanisme normal dianggap tidak lagi memadai.

Potensi Kelebihan

- Cepat dan tegas dalam situasi krisis.
- Dapat membuka jalan transisi jika disertai legitimasi publik.

Risiko Utama

- Bergantung pada niat dan integritas individu.
- Rentan ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan.
- Memerlukan dukungan institusional luas agar tidak berakhir pada instabilitas.

Catatan

Dekrit hanya relevan dalam keadaan luar biasa dan **harus segera diikuti** proses legitimasi rakyat.

2. Konvensi Nasional



Gambar 34. Ilustrasi Konvensi Nasional

Pengertian

Forum musyawarah kebangsaan yang menghimpun unsur masyarakat lintas sektor untuk merumuskan konsensus arah negara.

Potensi Kelebihan

- Inklusif dan deliberatif.
- Menghasilkan legitimasi moral dan sosial yang kuat.
- Mengurangi polarisasi pemerintahan.

Risiko Utama

- Tidak mengikat secara hukum bila tanpa payung konstitusional.

- Rentan menjadi forum simbolik jika tidak ditindaklanjuti.

Catatan

Efektif sebagai **tahap konsensus**, bukan satu-satunya solusi.

3. Referendum Rakyat



Gambar 35. Ilustrasi Referendum Rakyat

Pengertian

Pelibatan langsung rakyat untuk memutuskan isu konstitusional mendasar.

Potensi Kelebihan

- Legitimasi tertinggi.
- Menempatkan rakyat sebagai pemilik keputusan.

Risiko Utama

- Membutuhkan infrastruktur pemilu yang kredibel.

- Rentan manipulasi opini dan disinformasi.
- Pertanyaan harus dirumuskan sangat presisi.

Catatan

Referendum efektif bila **didahului edukasi publik** dan aturan main yang adil.

4. Perubahan Melalui Parlemen



Gambar 36. Ilustrasi Perubahan Melalui Parlemen

Pengertian

Amandemen konstitusi melalui mekanisme lembaga perwakilan yang ada.

Potensi Kelebihan

- Legal dan prosedural.
- Stabil secara kelembagaan.

Risiko Utama

- Konflik kepentingan (parlemen mengoreksi sistem yang menguntungkan dirinya).
- Proses lambat dan kompromistis.

- Rentan "koreksi setengah hati".

Catatan

Mungkin ditempuh bila ada **tekanan publik kuat** dan transparansi penuh.

5. People Power



Gambar 37. Ilustrasi People Power

Pengertian

Mobilisasi massa besar untuk menekan perubahan pemerintahan dan konstitusional.

Potensi Kelebihan

- Menunjukkan energi rakyat secara langsung.
- Dapat memecah kebuntuan pemerintah.

Risiko Utama

- Eskalasi konflik dan kekerasan.
- Vacuum of power jika tanpa desain transisi.
- Mudah ditunggangi kepentingan lain.

Catatan

People power adalah **gejala**, bukan desain. Tanpa peta transisi, hasilnya tak menentu.

6. Kudeta Militer (Analisis Risiko & Sejarah)



Gambar 38. Ilustrasi Kudeta Militer

Pengertian

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer di luar mekanisme sipil.

Potensi Kelebihan (Teoretis)

- Kecepatan dan kontrol situasi jangka pendek.

Risiko Utama

- Legitimasi rendah.
- Pembatasan kebebasan sipil.
- Sulit kembali ke supremasi sipil.
- Preseden berbahaya bagi demokrasi.

Catatan Historis

Secara global, kudeta militer **jarang menghasilkan pemulihan kedaulatan rakyat yang**

berkelanjutan. Ia sering mengganti satu masalah dengan masalah lain yang lebih dalam.

Menyatukan Tujuan, Bukan Menyamaratakan Jalan

Keenam opsi di atas **berbeda jalan, satu tujuan**: mengembalikan kedaulatan rakyat agar bekerja nyata. Namun tujuan yang sama **tidak membenarkan cara yang sama**. Setiap opsi membawa biaya, sosial, dan moral yang harus dihitung.

Bab ini menegaskan satu prinsip:

pemulihan kedaulatan rakyat yang bermartabat harus mengutamakan legitimasi, keselamatan warga, dan kesinambungan negara.

Tidak ada jalan tanpa risiko. Tetapi risiko terbesar adalah **membiarkan kedaulatan rakyat terus menjadi simbol**. Pilihan apa pun, jika kelak diambil, harus berangkat dari pengetahuan, musyawarah, dan desain transisi yang jelas.

BAB 14
Tahapan Transisi Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas tidak dapat lahir dari sistem yang masih cacat secara struktural. Setelah kritik konstitusional diajukan dan solusi normatif ditawarkan, pertanyaan berikutnya menjadi sangat konkret: **bagaimana cara berpindah dari sistem lama menuju tatanan berdaulat yang baru tanpa menjerumuskan negara ke dalam kekacauan?**

Bab ini menjawab pertanyaan itu.

Transisi menuju Indonesia Emas bukan peristiwa tunggal, melainkan **rangkaian tahapan kenegaraan yang sah, terbatas, dan berorientasi pemulihan kedaulatan rakyat**, bukan perebutan kekuasaan.

Transisi ini harus dilakukan secara sadar, terbuka, dan terkontrol, dengan prinsip utama: **negara tidak boleh runtuh, pemerintahan boleh berhenti sementara.**

1. Pembubaran DPR, MPR, dan Partai Politik

Langkah paling berat sekaligus paling mendasar dalam transisi adalah **pembubaran lembaga-lembaga representasi kejahatan politik lama** yang secara struktural telah kehilangan fungsi kedaulatan rakyat.

Pembubaran ini bukan bentuk penghukuman, melainkan **pengakuan jujur bahwa sistem perwakilan yang ada telah gagal menjalankan mandat kedaulatan rakyat secara substantif**.

Alasan Konstitusional dan Sosiologis

- DPR dan MPR pasca-amandemen tidak lagi berdiri sebagai mandataris rakyat, melainkan bagian dari sirkulasi kekuasaan segelintir orang.
- Partai politik telah bergeser dari alat rakyat menjadi **filter kekuasaan**, yang menyaring kehendak rakyat sesuai kepentingan internal.
- Seluruh mekanisme perwakilan terjebak dalam konflik kepentingan elektoral, sehingga **tidak mungkin menjadi aktor transisi yang netral**.

Pembubaran ini bersifat:

- **sementara**
- **berskala nasional**
- **dibatasi waktu**
- **tanpa kriminalisasi politik**

Tidak ada pelarangan ide, tidak ada pembungkaman ekspresi, dan tidak ada pembersihan ideologis. Yang dihentikan adalah **fungsi kelembagaan lama**, bukan hak politik warga negara.

2. Musyawarah Kenegaraan Nasional

Setelah pembubaran lembaga lama, **kedaulatan rakyat tidak boleh dibiarkan menggantung**. Kekosongan perwakilan harus segera diisi oleh forum yang memiliki legitimasi moral dan kebijaksanaan, bukan legitimasi elektoral.

Di sinilah **Musyawarah Kenegaraan Nasional (MKN)** menjadi jantung transisi.

Karakter Musyawarah Kenegaraan Nasional

MKN bukan parlemen, bukan partai, dan bukan pemerintahan. Ia adalah **forum kebijaksanaan nasional**, yang berfungsi:

- merumuskan arah pemulihan kedaulatan rakyat,
- menyusun prinsip dasar transisi konstitusional,
- dan menyiapkan desain kelembagaan pasca-transisi.

Peserta MKN berasal dari:

- cendekiawan lintas disiplin,
- rohaniawan lintas agama,
- budayawan dan tokoh adat,
- perwakilan daerah dan komunitas,
- serta tokoh masyarakat yang **tidak sedang memegang jabatan kekuasaan praktis**.

Musyawarah ini menandai **kembalinya politik ke makna aslinya: kebijaksanaan**, bukan kompetisi kekuasaan.

3. Pembentukan Dewan Negara Transisi

Untuk memastikan negara tetap berjalan secara fungsional, diperlukan **otoritas kenegaraan sementara** yang berdiri di atas pemerintah, tetapi tidak berubah menjadi rezim baru.

Maka dibentuklah **Dewan Negara Transisi (DNT)**.

Fungsi Dewan Negara Transisi

DNT bertindak sebagai:

- penjaga keberlangsungan negara,
- pengawas pemerintahan sementara,

- dan penghubung antara Musyawarah Kenegaraan Nasional dengan administrasi negara.

DNT **bukan pemerintahan**, dan tidak menjalankan fungsi eksekutif harian. Pemerintahan teknokratis tetap berjalan untuk:

- pelayanan publik,
- keamanan,
- ekonomi dasar,
- dan administrasi negara.

Dengan prinsip:

Dewan Negara menjaga arah, pemerintah menjalankan urusan.

Masa kerja DNT:

- terbatas secara waktu,
- tidak dapat diperpanjang sepihak,
- dan berakhir otomatis setelah pemulihan kedaulatan rakyat disahkan.

4. Konsultasi Publik dan Semi-Referendum

Pemulihan kedaulatan rakyat tidak boleh dilakukan atas nama rakyat tanpa keterlibatan nyata rakyat itu sendiri. Karena itu, tahap transisi harus ditutup dengan **konsultasi publik nasional** yang luas dan berlapis.

Namun mengingat kompleksitas dan risiko teknis, mekanisme yang digunakan bukan referendum tunggal yang menyederhanakan persoalan, melainkan **semi-referendum deliberatif**.

Bentuk Semi-Referendum

- dialog publik nasional dan daerah,
- forum warga,
- jajak pendapat konstitusional,
- serta pengesahan prinsip-prinsip kunci melalui persetujuan rakyat.

Yang dimintakan persetujuan bukan detail teknis, melainkan:

- arah perubahan konstitusi,
- posisi kedaulatan rakyat,
- peran MPR baru,
- dan desain negara pasca-transisi.

Dengan mekanisme ini:

- rakyat tidak hanya memilih,
- tetapi **memahami dan menyetujui** arah negaranya.

Transisi sebagai Jalan Tengah Beradab

Bab ini menegaskan bahwa jalan menuju Indonesia Emas **bukan jalan kekerasan, bukan kudeta, dan bukan ilusi reformasi kosmetik**. Ia adalah jalan tengah yang beradab:

- tegas tanpa brutal,
- radikal tanpa chaos,
- konstitusional tanpa kepura-puraan.

Transisi ini hanya mungkin jika bangsa ini berani mengakui satu hal:

sistem lama tidak bisa melahirkan kedaulatan baru.

Indonesia Emas bukan hadiah.

Ia adalah hasil keberanian kolektif untuk berhenti kecelik, dan mulai berdaulat secara sadar.

BAB 15
MPR Sementara, TAP MPR, dan Pemilu Baru

Pemulihan kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada gagasan atau momentum. Ia harus berujung pada **tata kelola transisi yang sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan**. Bab ini membahas fase krusial pasca-pemulihan awal: pembentukan **MPR Sementara (MPRS)**, penerbitan **TAP MPR sebagai dasar hukum transisi**, serta penyelenggaraan **pemilu baru** yang lahir dari kedaulatan rakyat yang telah dipulihkan.

Transisi yang tidak dirancang dengan baik berisiko menciptakan kekosongan hukum atau konflik legitimasi. Karena itu, fase ini harus menjadi **jembatan, bukan medan perebutan kekuasaan**.



Gambar 39. Ilustrasi Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

MPRS Sementara: Menjaga Arah Negara di Masa Transisi

Dalam masa transisi, negara membutuhkan lembaga yang mampu:

- menjaga kesinambungan konstitusional,
- mencegah kekosongan kedaulatan,
- dan mengawal pembentukan struktur permanen.

Di sinilah **MPR Sementara (MPRS)** berperan. MPRS bukan lembaga permanen, melainkan **forum mandat rakyat sementara** yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis kedaulatan hingga struktur definitif terbentuk.

Ciri utama MPRS sementara:

- bersifat **non-partisan**,
- beranggotakan unsur-unsur kebangsaan yang memiliki legitimasi moral dan intelektual,
- dan memiliki **masa tugas terbatas** dengan mandat yang jelas.

MPRS tidak bertugas mengelola pemerintahan harian, melainkan **menjaga arah dan batas transisi** agar tidak menyimpang dari tujuan pemulihan kedaulatan rakyat.

TAP MPR sebagai Dasar Hukum Transisi

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, **Ketetapan MPR (TAP MPR)** pernah menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam fase-fase krusial bangsa. Dalam konteks pemulihan kedaulatan, TAP MPR kembali relevan sebagai **landasan hukum transisi**.

TAP MPR berfungsi untuk:

- menetapkan kerangka transisi secara sah,
- mengatur relasi antara lembaga sementara dan lembaga eksekutif,
- menjamin kepastian hukum selama masa peralihan,
- serta mencegah tindakan sewenang-wenang atas nama darurat.

Melalui TAP MPR, arah transisi dinyatakan secara terbuka kepada publik, sehingga seluruh warga negara memahami **apa yang sedang berlangsung, untuk apa, dan sampai kapan**.

Komisi Pemilu & Referendum Nasional

Pemilu pasca-pemulihan kedaulatan membutuhkan penyelenggara yang **bebas dari beban masa lalu**. Oleh karena itu, pembentukan **Komisi Pemilu & Referendum Nasional** menjadi langkah penting.

Komisi ini bertugas:

- menyelenggarakan pemilu legislatif dan eksekutif yang baru,
- memfasilitasi referendum jika diperlukan,
- serta memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan transparan.

Komisi ini harus:

- independen dari pemerintah transisi,
- diawasi secara publik,
- dan bekerja berdasarkan kerangka hukum TAP MPR serta konstitusi hasil pemulihan.

Tujuannya bukan sekadar menghasilkan pemenang pemilu, melainkan **memulihkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi**.

Pemilu Pasca-Pemulihan Kedaulatan

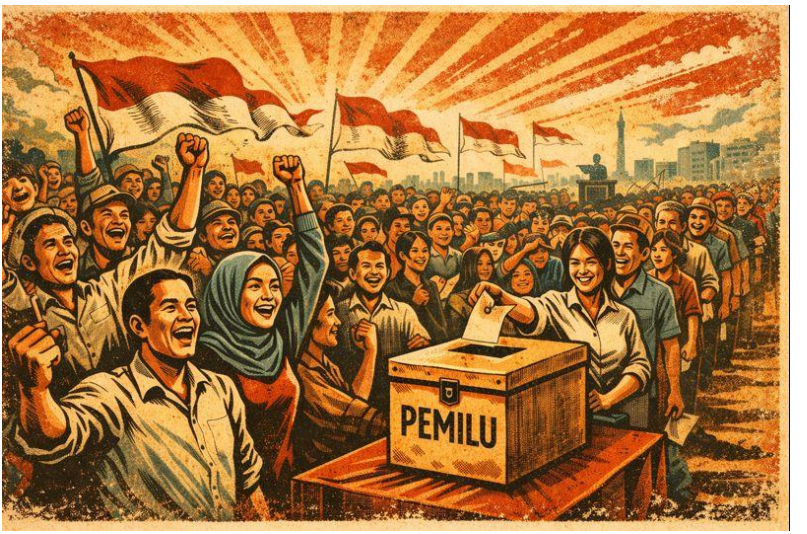

Gambar 40. Ilustrasi Pemilu Pasca-Pemulihan Kedaulatan

Pemilu yang diselenggarakan setelah kedaulatan rakyat dipulihkan memiliki makna berbeda dari pemilu rutin. Ia bukan sekadar sirkulasi kekuasaan, melainkan **peneguhan ulang kepemilikan negara oleh rakyat**.

Pemilu pasca-pemulihan harus:

- dilandasi struktur ketatanegaraan yang telah diperbaiki,
- menjamin keterpisahan tegas antara negara dan pemerintah,
- serta memastikan lembaga kedaulatan berdiri di atas pemerintahan hasil pemilu.

Dengan demikian, pemilu tidak lagi menjadi ajang perebutan negara, tetapi **mekanisme memilih pengelola negara**.

Dari Transisi ke Normalisasi Demokrasi

Pemulihan kedaulatan rakyat adalah proses bertahap. **MPRS sementara, TAP MPR, dan pemilu baru** bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai negara yang tertib, adil, dan berdaulat.

Keberhasilan fase ini ditandai oleh:

- berfungsinya lembaga negara secara jelas,
- berjalannya pemerintahan yang akuntabel,
- dan kembalinya rakyat sebagai pemilik sah negara, bukan sekadar pemilih.

Dengan MPR sementara yang bermandat jelas, TAP MPR sebagai payung hukum, dan pemilu baru yang bersih, bangsa ini dapat melangkah dari fase pemulihan menuju **demokrasi yang matang dan kedaulatan rakyat yang nyata**.

BAB 16
Indonesia Emas yang Sesungguhnya

Selama ini, Indonesia Emas kerap dipahami sebagai target ekonomi: pertumbuhan tinggi, infrastruktur megah, dan posisi strategis di panggung global. Semua itu penting, tetapi **bukan inti**. Indonesia Emas yang sesungguhnya bukan pertama-tama soal angka, melainkan soal **siapa yang berdaulat dan bagaimana kekuasaan dijalankan**.

Bab ini menegaskan bahwa kemajuan sejati hanya mungkin lahir dari **negara yang berdaulat secara substantif**, bukan sekadar stabil secara prosedural.



Gambar 41. Ilustrasi Indonesia Emas

Ciri Negara Berdaulat

Negara berdaulat bukan negara yang kuat menekan, melainkan negara yang **kuat melindungi**.

Kedaulatan sejati tampak dalam struktur, bukan slogan. Ciri-cirinya antara lain:

1. **Kedaulatan bekerja, bukan sekadar disebut**
   Rakyat tidak hanya diakui sebagai pemilik kedaulatan, tetapi memiliki mekanisme nyata untuk menguasai, mengarahkan, dan mengoreksi jalannya negara.
2. **Negara dibedakan tegas dari pemerintah**
   Negara bersifat permanen dan milik rakyat; pemerintah bersifat sementara dan bekerja berdasarkan mandat. Kritik kepada pemerintah tidak pernah dianggap ancaman terhadap negara.
3. **Lembaga negara berdiri di atas lembaga pemerintah**
   Ada pengawas struktural yang memastikan kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor konstitusi dan tujuan bernegara.
4. **Hukum berfungsi sebagai pelindung, bukan alat kekuasaan**
   Penegakan hukum tidak tebang pilih, tidak tunduk pada kepentingan segelintir orang, dan memberi rasa aman bagi warga.

Negara dengan ciri-ciri ini tidak bergantung pada figur kuat. Ia **tangguh karena sistemnya benar**.

Rakyat sebagai Pusat Keputusan

Indonesia Emas yang sesungguhnya menempatkan rakyat bukan sebagai objek kebijakan, melainkan **pusat keputusan strategis**. Ini tidak berarti

setiap kebijakan diputuskan melalui referendum harian, melainkan:

- rakyat memiliki lembaga mandataris yang benar-benar bekerja,
- aspirasi rakyat terhubung langsung dengan arah negara,
- dan keputusan besar tidak diambil tanpa persetujuan atau pengawasan pemilik kedaulatan.

Dalam negara seperti ini, partisipasi rakyat tidak berhenti pada pemilu. Ia hidup dalam pengawasan, musyawarah, dan koreksi berkelanjutan. Rakyat tidak sekadar "diwakili", tetapi **berdaulat secara operasional**.

Pemerintah sebagai Pelayan

Pemerintah dalam Indonesia Emas ditempatkan secara terhormat namun terbatas: **sebagai pelayan publik**. Pelayanan bukan makna simbolik, melainkan posisi struktural.

Sebagai pelayan:

- pemerintah bekerja berdasarkan mandat,
- dinilai berdasarkan kinerja,
- dan diganti jika gagal menjalankan tugas.

Pemerintah yang kuat bukan yang kebal kritik, melainkan yang **mudah dievaluasi**. Dalam struktur yang benar, loyalitas pemerintah tidak pernah diarahkan pada kekuasaan, melainkan pada **kepentingan rakyat sebagai pemilik negara**.

Kemajuan yang Bermartabat

Indonesia Emas bukan berarti negara tanpa masalah. Ia adalah negara yang **mampu menyelesaikan masalah tanpa mengorbankan kedaulatan rakyat**. Pembangunan berjalan, teknologi maju, ekonomi tumbuh tetapi semuanya berdiri di atas fondasi keadilan dan akuntabilitas.

Kemajuan tanpa kedaulatan hanya melahirkan ketimpangan. Stabilitas tanpa perlindungan hanya menghasilkan kelelahan kolektif. Indonesia Emas yang sesungguhnya justru ditandai oleh **rasa aman, kepercayaan, dan martabat warga negara**.

BAB 17
Negara yang Tidak Lagi Menipu Rakyat

Sejarah Indonesia modern menyimpan satu pola berulang: harapan lahir, janji ditebar, lalu kekecewaan datang. Pola itu terjadi berkali-kali—lintas rezim, lintas jargon, lintas generasi. Dalam bahasa sederhana, bangsa ini **terlalu sering kecelik**. Bukan karena rakyat bodoh, melainkan karena **negara tidak jujur pada struktur dan niatnya sendiri**.

Bab ini menandai satu tekad: **mengakhiri siklus kecelik** dan memulai negara yang jujur pada rakyatnya.



Gambar 42. Ilustrasi Siklus Kecelik

Akhir Siklus Kecelik

Siklus kecelik lahir ketika demokrasi hanya dipahami sebagai prosedur, bukan substansi. Pemilu berjalan, tetapi kedaulatan tidak bekerja. Janji

disampaikan, tetapi mekanisme pengawasan melemah. Rakyat diminta percaya, namun tidak diberi alat untuk mengendalikan.

Akhir siklus kecelik mensyaratkan satu keberanian: **mengakui bahwa masalah utama bukan pada siapa yang memimpin, melainkan pada bagaimana negara ditata**. Selama struktur memungkinkan penyimpangan, siapa pun yang berkuasa akan terdorong mengulang pola yang sama.

Mengakhiri kecelik berarti:

- menata ulang hubungan rakyat dengan lembaga kedaulatan,
- mengembalikan fungsi pengawasan struktural,
- dan memastikan kekuasaan selalu berada di bawah mandat pemiliknya.

Ini bukan revolusi emosi, melainkan **reformasi akal sehat**.

Negara Jujur pada Rakyat

Negara yang jujur adalah negara yang **mengatakan apa adanya**: siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, dan bagaimana pertanggungjawaban dijalankan. Kejujuran negara bukan soal retorika, melainkan **keterbukaan struktur**.

Negara jujur berarti:

- tidak menyamakan pemerintah dengan negara,
- tidak mempersonalisasi kekuasaan,
- tidak menyembunyikan keputusan strategis dari publik,
- dan tidak menjadikan stabilitas sebagai alasan membungkam koreksi.

Kejujuran negara tercermin ketika kritik tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perawatan demokrasi. Ketika kesalahan diakui dan diperbaiki, bukan disangkal atau ditutupi. Negara yang jujur tidak menuntut rakyat untuk selalu percaya. Ia **memberi alasan rasional untuk dipercaya**.

Demokrasi yang Bermakna

Demokrasi yang bermakna bukan demokrasi yang hanya menghitung suara, tetapi demokrasi yang **menjaga kedaulatan**. Ia memastikan bahwa setiap suara memiliki konsekuensi, dan setiap mandat memiliki pengawas.

Dalam demokrasi yang bermakna:

- rakyat adalah pusat keputusan strategis,
- lembaga kedaulatan bekerja di atas kepentingan rezim,
- pemerintah berfungsi sebagai pelayan yang mudah dievaluasi,
- dan aparat menjaga negara, bukan kekuasaan.

Demokrasi tidak berhenti pada bilik suara. Ia hidup dalam tata kelola, transparansi, dan kemampuan rakyat untuk mengoreksi arah negara tanpa rasa takut.

Dari Janji ke Sistem

Buku ini menolak optimisme kosong. Ia menawarkan satu pergeseran mendasar: **dari janji ke sistem**. Janji bergantung pada niat individu; sistem bekerja bahkan ketika niat goyah. Negara yang tidak lagi menipu rakyat adalah negara yang **mengunci**

kejujuran dalam struktur, bukan menggantungkannya pada moral personal semata.

Ketika:

- UUD dipahami sebagai kontrak pemilik dengan pengelola,
- MPR berfungsi sebagai penjaga mandat rakyat,
- pemerintah bekerja sebagai manajemen yang akuntabel,
- dan pemilu melahirkan pengelola, bukan pemilik,

maka kecelik tidak lagi menemukan ruang.

Keberanian untuk Dewasa

Menjadi bangsa dewasa berarti berani berhenti tertipu oleh kemasan. Berani menilai negara dari cara ia melindungi, bukan dari cara ia menghibur. Berani menuntut struktur yang jujur, bukan sekadar narasi yang indah.

Indonesia Emas yang sesungguhnya adalah Indonesia yang **tidak lagi menipu rakyatnya** dan tidak lagi membiarkan dirinya tertipu oleh ilusi sendiri. Di titik itulah, demokrasi berhenti menjadi ritual, dan berubah menjadi **jalan hidup bersama** yang adil, bermartabat, dan berdaulat.

BAB 18
Jalan Pulang Bangsa

Setiap bangsa memiliki momen tersesat ketika arah kabur, tujuan bergeser, dan makna bernegara direduksi menjadi rutinitas. Indonesia pun pernah dan sedang berada di titik itu. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa **tersesat bukan akhir**, selama bangsa memiliki keberanian untuk **pulang**. Bab ini adalah ajakan untuk kembali ke rumah republik—ke jalan yang sejak awal dirintis para pendiri bangsa.



Gambar 43. Ilustrasi Amandemen Kelima UUD NRI 1945

Indonesia sebagai Republik Sejati

Republik sejati bukan sekadar bentuk negara, melainkan **cara memandang kekuasaan**. Dalam republik, kekuasaan tidak diwariskan, tidak dipersonalisasi, dan tidak dipertuhankan. Ia **dititipkan**

oleh rakyat kepada lembaga, dijalankan oleh pengelola, dan diawasi oleh sistem.

Indonesia sebagai republik sejati berarti:

- rakyat adalah pemilik negara, bukan penonton;
- negara berdiri di atas kepentingan rezim;
- pemerintah bekerja sebagai pelayan publik;
- dan hukum melindungi yang lemah, bukan yang kuat.

Republik sejati tidak bergantung pada figur, tetapi pada **arsitektur kedaulatan**. Ketika struktur benar, siapa pun yang memimpin akan bergerak dalam koridor yang sama: melayani rakyat.

Pesan Moral dan Konstitusional

Pesan moral buku ini sederhana namun tegas: **keadilan tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari sistem yang jujur**. Moral tanpa struktur mudah runtuh; struktur tanpa moral menjadi kering. Indonesia membutuhkan keduanya.

Secara konstitusional, jalan pulang bangsa adalah **memulihkan makna kedaulatan rakyat** bukan sekadar mengulang teks, melainkan menghidupkannya dalam mekanisme nyata. Konstitusi harus kembali dipahami sebagai **kontrak pemilik dengan pengelola**, bukan alat legitimasi kekuasaan.

Pesan ini bukan tudingan, melainkan undangan. Undangan untuk membaca ulang sejarah tanpa prasangka, menilai sistem tanpa fanatisme, dan memperbaiki tanpa dendam.

Seruan Kesadaran Nasional

Kesadaran nasional tidak lahir dari propaganda, tetapi dari **kejujuran kolektif**. Dari keberanian mengakui kekeliruan, dan tekad untuk memperbaikinya bersama. Seruan ini ditujukan kepada semua:

- **Kepada rakyat**, agar tidak menyerahkan kedaulatannya pada rutinitas lima tahunan. Rakyat berhak mengawasi, mengoreksi, dan menuntut struktur yang adil.
- **Kepada pejabat**, agar berhenti menyamakan kekuasaan dengan kepemilikan. Kekuasaan adalah amanah, bukan warisan.
- **Kepada aparat negara**, agar menegaskan loyalitas pada negara dan rakyat, bukan pada kepentingan sementara.
- **Kepada kaum intelektual, rohaniawan, dan budayawan**, agar kembali menjadi penjaga nurani, bukan perias kekuasaan.

Kesadaran nasional adalah energi sunyi yang menggerakkan perubahan tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa ilusi.

Pulang Tanpa Menghapus Jejak

Jalan pulang bangsa bukanlah jalan menghapus masa lalu. Ia adalah jalan **membaca ulang**, **memperbaiki**, dan **menata ulang**. Pulang berarti kembali ke prinsip, bukan ke periode. Kembali ke tujuan, bukan ke romantisme.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia tidak kekurangan kecerdasan. Yang dibutuhkan adalah **keberanian structural** yaitu keberanian menata negara agar jujur pada rakyatnya.

Republik yang Dimiliki Rakyat

Buku ini berakhir pada satu keyakinan: Indonesia dapat menjadi republik yang matang, adil, dan bermartabat. Indonesia Emas bukan janji kosong jika kedaulatan rakyat bekerja nyata. Ketika negara dimiliki rakyat, dijalankan dengan akal sehat, dan dijaga dengan nurani, maka emas itu bukan mimpi—melainkan **jalan pulang bangsa**.

Di sanalah republik menemukan maknanya kembali. Di sanalah demokrasi menjadi hidup. Di sanalah Indonesia berdiri tegak—bukan karena kekuasaan, melainkan karena **keadilan dan kejujuran pada rakyatnya**.

EPILOG
Indonesia Emas 2026: Pilihan, Bukan Takdir

Tidak ada bangsa yang tiba di masa depan karena takdir semata. Setiap masa depan adalah hasil dari pilihan. Pilihan untuk jujur atau menipu diri sendiri, pilihan untuk membenahi atau membiarkan, pilihan untuk berdaulat atau menyerah pada kebiasaan.

Indonesia Emas 2026 bukanlah garis nasib yang pasti kita capai. Ia adalah **persimpangan**. Di satu sisi ada jalan lama: demokrasi prosedural yang nyaman, kekuasaan yang berputar tanpa pengawasan struktural, dan rakyat yang terus diminta bersabar. Di sisi lain ada jalan yang lebih sunyi, lebih berat, tetapi lebih jujur: **menata ulang negara agar kedaulatan rakyat bekerja nyata**.

Buku ini tidak menawarkan kepastian. Ia menawarkan **kesadaran**. Bahwa masalah bangsa ini bukan kekurangan potensi, melainkan keberanian memilih struktur yang benar. Selama negara dikelola seolah milik penguasa sementara, selama rakyat hanya dipanggil untuk memilih tetapi tidak menguasai, Indonesia Emas akan tetap menjadi slogan.
Pilihan itu ada pada kita bersama.

Memilih untuk mengembalikan negara sebagai organisasi milik rakyat. Memilih untuk menempatkan pemerintah sebagai pelayan, bukan penguasa. Memilih untuk menjaga hukum sebagai pelindung, bukan alat. Memilih untuk memulihkan lembaga kedaulatan agar tidak lagi menjadi ornamen demokrasi.

Indonesia Emas tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut **kejujuran struktural**. Keberanian untuk berkata: ada yang salah, dan kita siap memperbaikinya tanpa saling meniadakan.

Jika bangsa ini berani memilih, maka 2026 bukan sekadar angka dalam pidato. Ia menjadi titik balik saat republik ini benar-benar dimiliki rakyat, dijalankan dengan akal sehat, dan dijaga dengan nurani.

Indonesia Emas adalah pilihan.

Dan pilihan itu masih ada di tangan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I & II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Attamimi, A. Hamid S. (n.d.). Teori Perundang-undangan dan Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. (Sebagaimana dikutip dalam Jurnal Majelis).

Fayol, Henri. (n.d.). General and Industrial Management. (Analisis Kesesuaian dalam Naskah Akademik Sekolah Negarawan, 2025).

Hatta, Mohammad. (1966). Demokrasi Kita. Jakarta: Pustaka Antara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2020). Hasil Survei Pendapat Ahli Evaluasi UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: MPR RI.

Mintzberg, Henry. (n.d.). The Structuring of Organizations. (Analisis Struktur Organisasi Negara dalam Perspektif Sekolah Negarawan, 2025).

Nadjib, Emha Ainun. (2016). Mati Ketawa Ala Refotnasi. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Natsir, Mohammad. (n.d.). Demokrasi Tanpa Moral: Refleksi Tirani Mayoritas. (Sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademik Sekolah Negarawan, 2025).

Saputra, Prayogi R., & Setiyawan, Rinto. (2025). Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Sekolah Negarawan X Institute. (2025). Empat Pilar Mandataris Rakyat: Rekonstruksi Struktur MPR Berbasis Filosofi Sedulur Papat Lima Pancer. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Setiyawan, Rinto. (2025). Rakyat Kembali Berdaulat: Penataan Ulang Arsitektur Konstitusi. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Setiyawan, Rinto., & Saputra, Prayogi R. (2025). Naskah Akademik Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Rakyat Kembali Berdaulat. Malang: Sekolah Negarawan X Institute.